

**KESIAPAN WISATA HALAL DI KOTA BATU :
PERSPEKTIF PERENCANAAN STRATEGI (STUDI KASUS
DI DINAS PARIWISATA KOTA BATU)**

SKRIPSI



Oleh
BONDAN PRI AMBORO
NIM : 16510158

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**KESIAPAN WISATA HALAL DI KOTA BATU : PERSPEKTIF PERENCANAAN
STRATEGI (STUDI KASUS DI DINAS PARIWISATA KOTA BATU)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)



Oleh
BONDAN PRI AMBORO
NIM : 16510158

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KESIAPAN WISATA HALAL DI KOTA BATU : PERSPEKTIF
PERENCANAAN STRATEGI (STUDI KASUS DI DINAS
PARIWISATA KOTA BATU)**

O l e h
BONDAN PRI AMBORO
NIM : 16510158

Telah disetujui pada tanggal 1 Juni 2020
Dosen Pembimbing,

H. Slamet, SE., MM., P.hD
NIP 19660412 1998031 003

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Drs. Agus Sucipto, MM., CRA
NIP 19670816 2003121 001

LEMBAR PENGESAHAN

KESIAPAN WISATA HALAL DI KOTA BATU : PERSPEKTIF PERENCANAAN STRATEGI (STUDI KASUS DI DINAS PARIWISATA KOTA BATU)

SKRIPSI

Oleh

BONDAN PRI AMBORO

NIM : 16510158

Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)

Pada tanggal 23 Juni 2020

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji

Dr. Lailatul Farida, S.Sos., M.AB
NIDT. 19791010 20180201 2 192

()

2. Sekertaris/Pembimbing

H. Slamet, SE., MM., P.hD
NIP 19660412 1998031 00

()

3. Penguji Utama

Yayuk Sri Rahayu, SE., MM
NIP. 19770826 200801 2 011

()

Disahkan oleh :

Ketua Jurusan,

Drs. Agus Sucipto, M.M., CRA
NIP: 19670816200312100

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bondan Pri Amboro
NIM : 16510158
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Dengan ini menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KESIAPAN WISATA HALAL DI KOTA BATU : PERSPEKTIF PERENCANAAN STRATEGI (STUDI KASUS DI DINAS PARIWISATA KOTA BATU)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 1 Juni 2020



Hormat saya,

Bondan Pri Amboro

NIM : 16510158

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya persembahkan karya ini kepada orang-orang yang selalu memberikan semangat dan selalu mendoakan disetiap waktu

Untuk yang Kusayangi dan Kucintai

Kepada orang tua saya bapak Sutrisno dan ibu Suginem, serta keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan dari awal hingga akhir penulisan serta tak henti mendoakan dengan ikhlas. Untuk kekasih saya Ria Azaningsih yang selalu menemani dalam pengerjaan skripsi ini. Serta teman-teman semuanya yang telah banyak membantu selama ini.

MOTTO

**“ Apa Yang Kita Kerjakan Saat Ini Menentukan Hasil Yang Akan Kita Petik
Dikemudian Hari ”**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul *Kesiapan Wisata Halal Di Kota Batu : Perspektif Perencanaan Strategi (Studi Kasus Di Dinas Pariwisata Kota Batu)*. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa didalam penelitian ini berkat bantuan dan tutunan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lepas dari dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Drs. Agus Sucipto, M.M., CRA selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Slamet, SE., M.M., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Ibu dan keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spiritual.
7. Kekasihku Ria Azaningsih yang senantiasa membantu awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Sahabat kontrakan yang telah memberikan do'a dan dukungan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
9. Teman-teman sebimbangan Pak Slamet yang selalu menghibur dikala banyak revisi.
10. Teman-teman jurusan manajemen 2016 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
11. Dan seluruh pihak terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal Alamin.

Malang, 1 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Konteks Penelitian.....	1
1.2 Fokus Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Bagi peneliti	7
1.4.2 Bagi akademis	7
1.4.3 Bagi Dinas.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Manajemen Strategi.....	13
2.2.1 Pengertian Manajemen Strategi	13
2.2.2 Model Manajemen Strategi	16
2.2.3 Formulasi (Perencanaan) Strategi	17
2.3 Tinjauan Wisata Halal	29
2.2.1 Wisata.....	29

2.2.2 Wisata Halal	30
2.4 Kerangka Berfikir	36
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis dan Pendekatan	38
3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data	39
3.3.1 Motode Wawancara	39
3.3.2 Metode Observasi.....	40
3.3.3 Metode Dokumentasi	41
3.4 Data dan Jenis Data	42
3.4.1 Data Primer	42
3.4.2 Data Sekunder	42
3.5 Analisis Data.....	42
3.5.1 Reduksi Data	45
3.5.2 Penyajian Data (<i>Display</i>)	45
3.5.3 Menarik Kesimpulan atau Verifikasi	46
BAB IV : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	39
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	39
4.2 Paparan Data Hasil Penelitian	41
4.2.1 Kesiapan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam Percepatan Wisata Halal	41
4.2.2 Temuan hasil penelitian	49
4.3 Pembahasan	55
BAB V : PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2.2 Matriks SWOT.....	25
Tabel 3.1 Wawancara.....	40
Tabel 3.2 Observasi.....	40
Tabel 3.3 Dokumentasi.....	41
Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah.....	44
Tabel 4.2 Jumlah Masjid dan Musholla Di Kota Batu.....	47
Tabel 4.3 Jumlah Objek Wisata Di Kota Batu.....	47
Tabel 4.4 Jumlah Rumah Makan Dan Restoran Di Kota Batu.....	48
Tabel 4.5 Jumlah Hotel, Villa Dan Home Stay Di Kota Batu.....	48
Tabel 4.6 Tabel kesiapan wisata halal di Kota Batu.....	54

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Model Komprehensif Manajemen.....	16
Bagan 2.2 Kerangka Berfikir.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Analisis Miles & Huberman.....	44
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumen.....	68
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	109
Lampiran 3 Foto Observasi.....	112

ABSTRAK

Amboro, Bondan. P. 2020, SKRIPSI Judul : Kesiapan Wisata Halal Di Kota Batu : Perspektif Perencanaan Strategi (Studi Kasus Di Dinas Pariwisata Kota Batu)

Pembimbing : H. Slamet, SE., MM., Ph.D

Kata Kunci : Manajemen Strategi, Perencanaan Strategi dan Wisata Halal.

Formulasi (perencanaan) adalah tahapan pertama dimana perusahaan atau organisasi menetapkan visi serta misi yang disertai dengan analisis mendalam terkait faktor internal dan eksternal perusahaan, tujuan jangka panjang dan pemilihan strategi yang akan digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesiapan Dinas Pariwisata Kota Batu untuk menangani percepatan wisata halal di Kota Batu dengan menggunakan perspektif perencanaan strategi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kota Batu dengan narasumber Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Dinas Pariwisata Kota batu. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kota Batu belum memiliki kesiapan dalam menangani percepatan wisata halal di Kota Batu. Hal ini ditunjukkan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu masih belum membahas tentang percepatan wisata halal di Kota Batu. Selain itu berdasarkan hasil penelusuran dokumen resmi pemerintah yaitu Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Pariwisata Kota Batu tidak ditemukan pembahasan mengenai percepatan wisata halal.

ABSTRACT

Amboro, Bondan. P. 2020, THESIS. Title: Halal Tourism Readiness in Batu City : Strategic Planning Perspective (Case Study In Batu City Tourism Office)

Advisor : H. Slamet, SE., MM., Ph.D

Keywords : Strategic Management, Strategic Planning and Halal Destination.

Formulation (planning) is the first stage in which a company or organization establishes its vision and mission accompanied by an in-depth analysis related to the company's internal and external factors, long-term goals and selection of strategies to be used. This study aims to see the readiness of the Batu City Tourism Office to deal with the acceleration of halal tourism in Batu City by using a strategic planning perspective.

This research uses a qualitative approach. The object of this research was the Batu City Tourism Office with the chief informant as the Tourism Product Development Division of the Batu City Tourism Office. The analytical tool in this study uses the SWOT analysis.

Based on the results of research that has been done, it shows that the Batu City Tourism Office does not yet have the readiness to handle the acceleration of halal tourism in Batu City. This is indicated by the vision and mission of the Batu City Government that has not yet discussed the acceleration of halal tourism in Batu City. In addition, based on the results of the search for official government documents, namely the 2017-2022 Strategic Plan of the City of Batu Tourism Office, no discussion was found regarding the acceleration of halal tourism.

التجريد

امبورو، بوندان. ص 2020 ، أطروحة. العنوان: الجاهزية السياحية للحلال في مدينة باتو: منظور التخطيط الاستراتيجي (دراسة حالة في مكتب السياحة بمدينة باتو)

مستشار : احلاج سالم، املاجسرت

الكلمات الدالة : الإدارة الإستراتيجية والتخطيط الإستراتيجي ووجهة الحلال

الصياغة (التخطيط) هي المرحلة الأولى التي تحدد فيها الشركة أو المؤسسة رؤيتها ورسالتها مصحوبة بتحليل متعمق يتعلّق بالعوامل الداخلية والخارجية للشركة ، والأهداف طويلة المدى واختيار الاستراتيجيات التي سيتم استخدامها. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى استعداد مكتب السياحة بمدينة باتو للتعامل مع تسريع السياحة الحلال في مدينة باتو باستخدام منظور التخطيط الاستراتيجي.

يستخدم هذا البحث نهجا نوعيا. كان الهدف من هذا البحث هو مكتب السياحة في مدينة باتو مع كبير المخبرين باعتباره قسم تطوير المنتجات السياحية في مكتب السياحة في مدينة باتو. تستخدم الأداة التحليلية في هذه الدراسة تحليل SWOt.

بناءً على نتائج البحث الذي تم إجراؤه ، يظهر أن مكتب السياحة في مدينة باتو ليس لديه الاستعداد للتعامل مع تسارع السياحة الحلال في مدينة باتو. ويتضح ذلك من رؤية ورسالة حكومة مدينة باتو التي لم تناقش بعد تسريع السياحة الحلال في مدينة باتو. بالإضافة إلى ذلك ، وبناءً على نتائج البحث عن وثائق حكومية رسمية ، وهي الخطة الإستراتيجية 2017-2022 لمكتب السياحة بمدينة باتو ، لم يتم العثور على أي نقاش حول تسريع السياحة الحلال.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Berdasarkan dokumen resmi Pemerintah Kota Batu, sejak abad ke-10, wilayah Kota Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayah Kota Batu adalah daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga didukung oleh keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan.

Wilayah Kota Batu terletak di dataran tinggi di lereng pegunungan dengan ketinggian 700 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun yang dilacak keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang kapan nama “Batu” mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan tersebut.

Dari beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu.

Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya

lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau Batu sebagai sebutan yang digunakan untuk sebuah kota dingin di Jawa Timur.

Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif pada 6 Maret 1993. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang (WongBatu, 2020).

Sebagai kota yang baru terbentuk pada tahun 2002, walikota pertama yang menjabat dan memimpin Kota Batu adalah Dr. H.M. Imam Kabul M.Si. M.Hum (2001-2007), lalu dilanjutkan oleh Drs. Muhammad Khudlori (2007), Drs. Soerjanto Soebandi M.M. (2007), H. Eddy Rumpoko (2007-2012 dan 2012-2017) dan Dra. Hj. Dewanti Rumpoko M.Si (2017-sekarang). Selain walikota, logo Kota Batu juga berganti dimasa kepemimpinan Eddy Rumpoko pada tanggal 20 Mei 2013 yang semula bertuliskan “Kota Wisata Batu” berubah menjadi “Shining Batu”.

Di sebuah website yang menyatakan 10 Destinasi Halal yang ada di Indonesia antara lain :

Pada tahun 2019 ini, Kota Batu menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata halal yang ada di Indonesia, penghargaan ini diberikan oleh Global Muslim Travel Index (GMTI). 10 destinasi wisata halal yang ada di Indonesia adalah antara Lombok (NTB), Riau-Kepulauan Riau, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), serta Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya) (Setiawan, 2019).

Apabila istilah halal itu disandingkan dengan istilah destinasi dan wisata, maka mengandung makna bahwa wisata halal adalah tujuan wisata yang baik dilakukan dan dijadikan pilihan menurut perspektif syariat karena dalam atmosfer

wisata ini diupayakan terhindar dari kontaminasi apa pun saja yang mengharamkan (Djakfar, 2017:29). Karena itu wisata halal yang seringkali disebut pula dengan istilah wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan destinasi wisata halal adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih dari wilayah kawasan administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Setelah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Kota Wisata Halal, promosi terus digencarkan oleh Pemerintah Kota Batu khususnya bagian Dinas Pariwisata. Salah satunya ialah melakukan promosi wisatanya ke dalam dan keluar negeri. Promosi ini dilakukan, selain untuk mempromosikan Kota Batu sebagai kota wisata, namun juga untuk menarik para wisatawan agar berkunjung ke Kota Batu. Dalam hal ini pemerintah Kota Batu sendiri terus berupaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan wisatawan asing. Dimana dalam upaya untuk menarik perhatian para wisatawan Pemerintah Kota Batu akan melaksanakan festival yang bertaraf internasional, kunjungan keberbagai daerah dan berbagai negara. Salah satu festival yang bertaraf internasional yang telah dilaksanakan ini dinamakan *Diplomatic Tour Batu International Islamic Tourism* yang diselenggarakan pada tahun 2016. Dimana festival ini akan dihadiri oleh perwakilan dari 20 negara di lima Benua.

Adanya acara ini diharapkan ada peningkatan kunjungan wisatawan asing yang ingin datang ke Kota Batu. Pada event tersebut menghadirkan keberagaman

seni budaya islam, serta beragam destinasi wisata yang dimiliki Kota Batu. Pemerintah Kota Batu menargetkan akan terjadi pertumbuhan jumlah wisatawan asing sebanyak 20%.

Tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan mancanegara saja, namun Pemerintah Kota Batu juga berfokus pada wisatawan lokal dengan cara melakukan promosi keberbagai daerah yang ada di Indonesia. Dimana pada tahun 2017 Badan Pusat Statistik mencatat kunjungan para wisatawan lokal di Kota Batu ini mencapai 4,184 juta orang (BPS Kota Batu, 2019).

Di tahun 2019 ini, Pemerintah Kota Batu berupaya untuk membenahi infrastruktur terutama dalam hal pariwisatanya. Upaya ini dilakukan pemerintah agar bisa lebih menarik perhatian para wisatawan baik wisatawan lokal atau wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara atau wisatawan asing. Hal ini juga dilakukan agar target untuk menaikkan jumlah wisatawan ke Kota Batu ini tercapai. Diperkirakan dan melihat pertumbuhan grafik dari tahun ke tahun jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang datang ke Kota Batu terus meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian awal ditemukan bahwa salah satu promosi yang digencarkan oleh Pemerintah Kota Batu ialah konsep Pariwisata Halal. Hal ini dikarenakan Kota Batu yang sudah terkenal dengan objek wisatanya, sehingga Pemerintah Kota Batu khususnya Dinas Pariwisata Kota Batu ingin mewujudkan konsep wisata Halal di Kota Batu. Maka, niat dari Pemerintah Kota Batu untuk mewujudkan konsep Pariwisata halal di Kota Batu juga harus dibarengi dengan dukungan dari para pelaku usaha wisata, instansi-instansi terkait seperti Dinas

Kesehatan, Dinas pertanian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batu, Kementerian Keagamaan dan instansi lainnya serta masyarakat Kota Batu sendiri.

Berdasarkan studi awal yang dilakukan oleh peneliti, pada kenyataannya sampai saat ini Pemerintah Kota Batu, masih belum bisa mewujudkan konsep wisata halal di Kota Batu. Ini di karenakan Pemerintah Kota Batu belum membuat dan menjalankan rancangan tentang konsep wisata halal, sejauh ini Pemerintah Kota Batu khususnya Dinas Pariwisata masih sebatas melakukan sosialisasi tentang wisata halal kepada beberapa pelaku usaha wisata dan beberapa instansi terkait. Rancangan konsep wisata hahal sebenarnya sudah dicanangkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, karena Kota Batu sudah menerima dan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Pariwisata tahun 2018 tentang rencana wisata halal. Tetapi rancangan kegiatan yang diajukan oleh Dinas Pariwisata kepada dewan masih belum mendapatkan persetujuan. Hal inilah yang menjadi penghambat belum berjalannya percepatan untuk mewujudkan wisata hahal di Kota Batu.

Menurut dari Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata yang akrab dipanggil Ibu Hasanatul Mardiyah Hs,SH.,MM, beliau mengatakan “melihat keadaan yang masih belum benar-benar mendukung ini, Dinas Pariwisata Kota Batu tidak serta-merta berhenti melakukan percepatan rencana menjadikan Kota Batu sebagai kota wisata halal. Di tahun 2020 ini Dinas Pariwisata Kota Batu tetap melakukan kegiatan sosialisai kepada para pelaku usaha seperti *Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia* (PHRI) dan *association of the Indonesia Tours and Travel* (ASITA), villa, guest house dan pelaku wisata yang ada di Kota Batu.

PHRI sendiri akan memastikan hotel-hotelnya halal bagi wisatawan Muslim seperti tersedianya mushola dan tempat beribadah, tersedia sajadah dan perlengkapan shalat, serta adanya arah kiblat di dalam kamar hotel. Sedangkan ASITA akan membuat paket-paket wisata ke tempat wisata religi dan ziarah”.

Dari pemaparan di atas, peneliti akan meneliti kesiapan Kota Batu untuk menjadi salah satu destinasi Wisata Halal dengan judul “*Kesiapan Wisata Halal Di Kota Batu : Perspektif Perencanaan Strategi (Studi Kasus Di Dinas Pariwisata Kota Batu)*”.

1.2 Fokus Penelitian

Bertolak dari konteks penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

Bagaimana kesiapan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam mewujudkan wisata halal di Kota Batu dalam perspektif perencanaan strategi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengungkapkan kesiapan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam mewujudkan wisata halal di Kota Batu dalam perspektif perencanaan strategi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diharapkan akan memberikan nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan manajemen pariwisata halal. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah :

1.4.1 Bagi peneliti

Sebagai kajian keilmuan yang diperbandingkan dengan kondisi riil, sehingga melahirkan wawasan, pengalaman dan kematangan ilmu yang diharapkan menjadi bekal dalam menghadapi dunia kerja.

1.4.2 Bagi akademis

Sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan sebagai tambahan referensi

1.4.3 Bagi Dinas

Sebagai bahan informasi dan sebagai dasar kebijakan dalam mengambil keputusan dan mempertahankan konsumen yang diharapkan dapat mewujudkan strategi yang lebih baik dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu.

Pada bab ini akan diuraikan tentang penelitian atau karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari penjiplakan atau duplikasi. Selain itu, menambah referensi bagi peneliti sebab semua kontruksi yang berhubungan dengan penelitian ini telah tersedia. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan wisata halal, antara laini :

- a. Assari dalam penelitiannya yang bertujuan untuk skripsi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elsa, dapat diketahui bahwasannya pengembangan wisata halal di PulauMerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum seluruhnya menjadi wisata halal, karena masih ada beberapa faktor yang tidak sesuai dengan syariah yang meliputi perbedaan tempat berkumpul laki-laki dan wanita masih pada tempat yang sama atau belum ada perbedaan antara tempat berkumpul laki-laki dan wanita, masih ada pihak tertentu yang meminum minuman keras, masih ada pedagang yang menjual minuman keras di sekitar kawasan wisata. Namun kondisi lain beberapa aspek ada yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu terdapatnya sarana dan prasarana ibadah seperti musholla, kamar mandi dan tempat wudhu, kemudian makanan dan minuman yang dijual sudah sesuai dengan prinsip syariah dan hotel yang berdiri didekat wilayah wisata Pulau Merah sudah sesuai

dengan syariah berdasarkan pedoman fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang wisata halal sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

- b. Fadhilah dalam penelitiannya yang bertujuan untuk skripsi. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Kontribusi Radio City Guide 911 FM terhadap pengembangan pariwisata Malang ialah, (1) Untuk menyebarkan informasi spot-spot pariwisata halal dengan produk Jalan-Jalan Plus yang mengenalkan wisata halal di Malang Raya. Selain itu dengan program 911 Hot News, berisi informasi update perkembangan wisata halal di Malang baik nasional maupun international. Penyebaran informasi radio City Guide 911 juga bisa di akses dengan streaming radio baik dari Tune-in ataupun website dan aplikasi AMEG di Playstore. (2) Mendorong masyarakat berkunjung ke lokasi wisata halal, dengan mengenalkan wisata halal Malang di forum diskusi Program Idjen Talk yang mengundang para profesional dan praktisi di Malang Raya, membahas tentang topik pembangunan wisata halal yang melibatkan pendengar untuk menyampaikan opini dan gagasan konstruktifnya. (3) Menawarkan tips atau solusi berwisata di tempat wisata halal, dengan memberikan wawasan tentang pentingnya berkunjung ke wisata halal di program Idjen Talk dan menghadirkan banyak pilihan lokasi wisata halal dari produk Jalan-Jalan Plus serta melibatkan pendengar melalui whatsapp untuk saling berbagi tips dan solusi berwisata halal. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pariwisata halal sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

- c. Satriana & Faridah dalam jurnalnya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata halal perlu untuk dilakukan, salah satunya dengan melakukan berbagai penelitian atau kajian. Hingga kini, penelitian terkait wisata halal masih terbatas, terutama di Indonesia. Salah satu penelitian yang mungkin dapat dilakukan yakni terkait persepsi wisatawan non-muslim terhadap wisata halal. Selain itu, peluang untuk mengembangkan pariwisata halal juga terbuka lebar.
- d. Harahsheh, Haddad & Alshorman dalam jurnalnya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa para penulis menyatakan strategi unik pariwisata halal di Yordania untuk membangun jenis ini pariwisata di negara ini lebih baik dalam hal infrastruktur dan supra-struktur dan kemudian memasarkan Yordania sebagai tujuan wisata halal. Seharusnya strategi dan kebijakan seperti itu segera diimplementasikan. Ketersediaan hotel, restoran, dan fasilitas F&B terkait yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi Halal lokal atau internasional yang memastikan tidak ada minuman alkohol, tidak ada babi, dan lain-lain. Sebagai alat promosi, fasilitas seperti itu harus membangun “program loyalitas pelanggan muslim” untuk meningkatkan wisatawan muslim dan merek fasilitas halal seperti halal hotel, makanan dan minuman halal dan restoran halal.

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
1	Assari (2017)	Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat wisata halal di Pulau Merah.	Penelitian yang dilakukan oleh Elsa Assari berfokus untuk melihat apakah perkembangan dan penyelenggaraan pariwisata Pulau Merah sudah sesuai atau belum dengan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah
2	Fadhilah (2017)	Kontribusi Radio City Guide 911 Fm Dalam Pengembangan Pariwisata Halal (Halal Tourism) Di Kota Malang Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/2016	Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat kontribusi Radio City Guide 911 FM dalam pengembangan wisata halal Di Kota Malang.	Penelitian yang dilakukan oleh Hasna Fadhilah dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi radio <i>City Guide 911 FM</i> dalam pengembangan wisata halal di kota Malang dan untuk melihat sudah sesuaikah praktik wisata halal yang dilakukan Kota Malang ditinjau fatwa DSNMUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.
3	Satriana & Faridah (2018)	“Wisata Halal: Perkembangan,	Penelitian ini bertujuan untuk	Berdasarkan hasil peneitian, dapat

		Peluang, Dan Tantangan”.	melihat perkembangan, peluang dan tantangan wisata halal.	disimpulkan bahwa pengembangan wisata halal perlu untuk dilakukan, salah satunya dengan melakukan berbagai penelitian atau kajian. Hingga kini, penelitian terkait wisata halal masih terbatas, terutama di Indonesia. Salah satu penelitian yang mungkin dapat dilakukan yakni terkait persepsi wisatawan non-muslim terhadap wisata halal. Selain itu, peluang untuk mengembangkan pariwisata halal juga terbuka lebar.
4	Harahsheh, Haddad & Alshorman (2019)	“Implications Of Marketing Jordan as A Halal Tourism Destination”.	Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana wisata halal yang ada di Jordan.	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa para penulis menyatakan strategi unik pariwisata halal di Yordania untuk membangun jenis ini pariwisata di negara ini lebih baik dalam hal infrastruktur dan supra-struktur dan kemudian memasarkan Yordania sebagai tujuan wisata halal. Seharusnya strategi dan kebijakan seperti itu segera diimplementasikan. Ketersediaan hotel, restoran, dan fasilitas F&B terkait yang disertifikasi oleh

				lembaga sertifikasi Halal lokal atau internasional yang memastikan tidak ada minuman alkohol, tidak ada babi, dan lain-lain. Sebagai alat promosi, fasilitas seperti itu harus membangun “program loyalitas pelanggan muslim” untuk meningkatkan wisatawan muslim dan merek fasilitas halal seperti halal hotel, makanan dan minuman halal dan restoran halal.
--	--	--	--	--

Sumber : Data diolah (2020)

Persamaan dalam keempat penelitian yang tertuang dalam Tabel 1.1 di atas adalah keempat penelitian tersebut sama-sama membahas wisata halal atau pariwisata halal, yang membedakan dari keempat penelitian di atas hanya pada objek yang ditelitinya.

2.2 Tinjauan Manajemen Strategi

2.2.1 Pengertian Manajemen Strategi

Manajemen strategi (*strategic management*) adalah seni dan ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan menevaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (David, 2006:5). Dalam buku lain mengatakan, manajemen strategi merupakan rangkaian dua perkataan terdiri dari kata “manajemen” dan “strategi” yang masing-masing memiliki pengertian sendiri, dan apabila telah dirangkai menjadi terminologi

berubah dengan memiliki pengertian tersendiri (Nawawi, 2012:147). Setelah ini akan dijabarkan terlebih dahulu pengertian dari setiap katanya dan kemudian pengertian secara lengkap menurut para ahli.

Secara konsep implisit terdapat konsep yang menatakan bahwa manajemen merupakan kemampuan pimpinan (manajer) dalam menggunakan orang lain dengan kegiatan menciptakan dan mengembangkan kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif (Nawawi, 2012:36).

Di lihat dari sudut etimologi (asal kata), penggunaan kata “strategis” dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dibuat secara sistematis dalam melakukan fungsi manajemen, yang searah pada tujuan strategi organisasi (Nawawi, 2012:147). Selanjutnya ia mengatakan :

Manajemen strategis adalah arul keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan suatu strategi, menjadi strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Pengertian ini berfokus pada arul keputusan dari pimppinan organisasi dan tindakan berupa pelaksanaan keputusan, harus menghasilkan satu atau lebih strategi, dengan memilih yang paling efektif atau yang paling besar peluangnya dalam usaha mencapai tujuan.

Manajemen strategi dalam artian dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah segala strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melakukan dakwahnya, strategi yang dilakukan itu adalah dengan mengamati kekuatan secara internal dan eksternal atau melihat situasi yang sedang terjadi. Sebagai contoh berdakwa secara diam-diam pada awal kenabian dan akhirnya berdakwah secara terang-terangan (Antariksa, 2017:32).

Strategi adalah rencana berskala besar, dengan tujuan mencapai masa depan, untuk menyesuaikan diri dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan (Pearce & Robinson, 2008:6). Sedangkan Manajemen Strategi (strategic Management) diartikan sebagai satu bentuk keputusan dan tindakan yang menghasilkan perencanaan dan implementasi rencana yang direncanakan untuk meraih tujuan suatu perusahaan. Selanjutnya mereka (Pearce & Robinson, 2008:5) manajemen strategis terdiri atas (9) tugas utama:

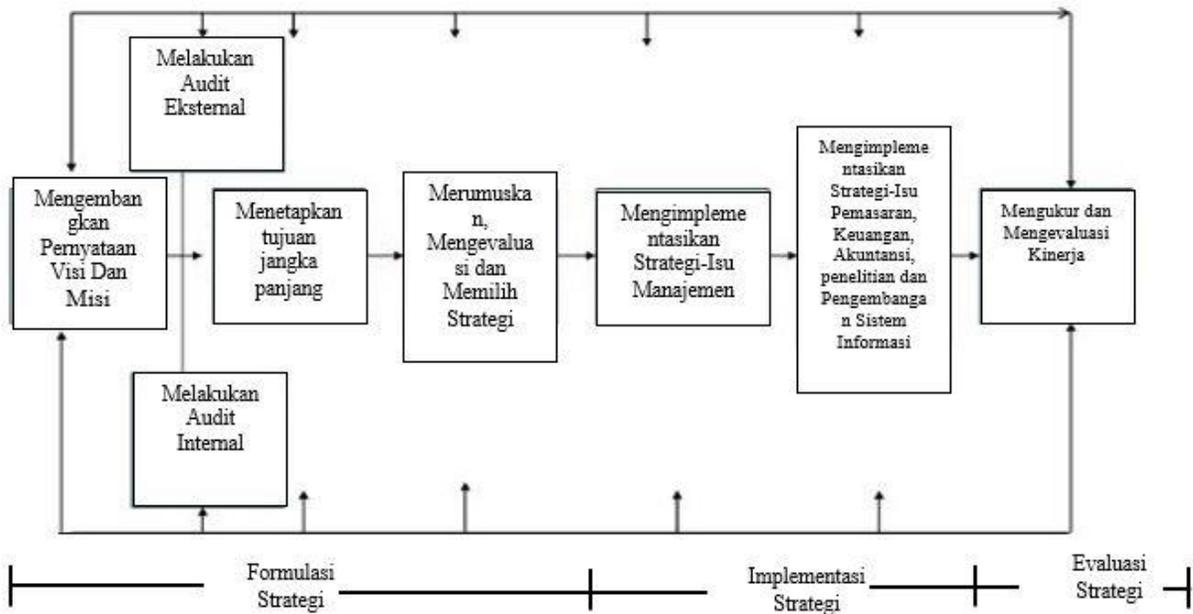
1. Merumuskan dan membuat misi perusahaan, termasuk pernyataan umum tentang tujuan, filosofis, dan target perusahaan.
2. Melakukan analisis yang menggambarkan kondisi dan kapabilitas internal perusahaan.
3. Menilai lingkungan eksternal perusahaan, baik kompetisi dengan pesaing dan juga faktor-faktor lain.
4. Menganalisis pilihan-pilihan perusahaan dengan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki dengan lingkungan eksternal.
5. Mengenali pilihan-pilihan yang paling diinginkan dengan mengevaluasi setiap pilihan berdasarkan misi perusahaan.
6. Memilih seperangkat target jangka panjang dan strategi besar yang mampu mencapai hasil yang paling diinginkan.
7. Mengembangkan target tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan pilihan seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi besar.

8. Menerapkan pilihan-pilihan strategis melalui pengalokasian sumber daya yang dianggarkan, dimana kesesuaian tugas-tugas, karyawan, struktur, teknologi, dan sistem imbalan ditekankan.
9. Mengevaluasi keberhasilan strategi sebagai masukan bagi pengambilan keputusan di masa depan.

2.2.2 Model Manajemen Strategi

Manajemen strategi ialah suatu proses Formulasi, Implementasi dan Evakuasi yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (David, 2006:5). Perhatikan bagan untuk memahami alur manajemen strategi menurut :

Bagan. 2.1 Model Komprehensif Manajemen



Sumber : (David, 2006)

Berdasarkan bagan 2.1 diatas, fungsi manajemen strategi dibagi atas 3 bagian, yaitu formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Formulasi strategi (perencanaan strategi) akan dijelaskan pada sub-bab dibawah ini.

2.2.3 Formulasi (Perencanaan) Strategi

Formulasi (perencanaan) adalah tahapan pertama dimana perusahaan atau organisasi menetapkan visi serta misi yang disertai dengan analisis mendalam terkait faktor internal dan eksternal perusahaan, tujuan jangka panjang dan pemilihan stratgi yang akan digunakan (David, 2006:5).

Selain itu, dalam ajaran islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan contoh bagaimana pentingnya sebuah perencanaan bagi kehidupan manusia. Perencanaan yang di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak sebatas dalam kehidupan sehari-hari, namun juga dalam peperangan.

Dalam sebuah buku dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pada waktu itu akan melakukan perang dengan kota Makkah, sehingga beliau menyusun rencana untuk melakukan penyerangan terhadap para pedagang (pemasok) yang akan masuk ke kota Makkah, tujuannya untuk membuat kejayaan kota tersebut turun dan terpaksa harus berdamai dengan umat muslim (Rogerson, 2012:186).

Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ، عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)” (Q.S Al-Anfal, 8:60)

Dalam teori mengenai perencanaan strategis dijelaskan bahwa perencanaan strategis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan memperhitungkan sumber daya, peluang, dan tantangan. Aspek sumber daya menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhitungkan dalam perencanaan ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam ayat di atas disebutkan bahwa yakni kaum muslimin diperintahkan untuk mempersiapkan kekuatan apa saja yang dibutuhkan untuk menghadapi musuh. Persiapan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah persiapan sumber daya dalam bentuk apa saja yang dapat digunakan bagi kesuksesan perencanaan strategis yang akan dilakukan (Shihab, 2002:286).

Kata *al-quwwah* dalam ayat di atas berarti kekuatan, dapat dimaknai dengan sumber daya itu sendiri karena memang sumber daya adalah kekuatan yang harus dimiliki dan dipersiapkan dengan baik dalam melakukan perencanaan strategis, khususnya dalam hal peperangan. Sumber daya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah meliputi berbagai aspek seperti, aspek sumber

daya manusia, aspek ekonomi atau finansial, aspek persenjataan, dan lain-lain (Shihab, 2002:486).

Dalam perencanaan strategi, ada 4 tahap yang harus dilewati oleh perusahaan untuk membuat suatu strategi, yaitu Membuat Visi dan Misi, Penilaian Lingkungan Internal dan Eksternal, Analisis SWOT dan Implementasi Strategi. Keempat tahap ini akan dijelaskan dalam sub-bab berikut ini:

2.2.2.1 Visi dan Misi

Visi adalah suatu gagasan dimana gagasan tersebut menjawab pertanyaan “*what will our business be?*” Atau “*what do we want to become?*” yang artinya “apa yang akan menjadi bisnis kita?” atau “kita ingin menjadi apa?” (Solihin, 2012:21).

Misi ialah suatu tujuan unik atau berbeda yang membedakannya diri dari perusahaan-perusahaan lain sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasional. Jika dalam pernyataan, misi biasanya menjabarkan hal-hal seperti karakteristik atau ciri produk, pasar yang dimasuki serta teknologi yang digunakan (Amrullah, 2015:85).

Visi dalam ajaran Islam adalah terkait dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu membangun sebuah kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah, seperti dalam firman-Nya Q.S Al-Ankabut ayat 16:

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Dan (ingatlah) Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Sembahlah Allah dan bertakwalah kepada-Nya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”* (Q.S Al-Ankabut, 29:16).

Lebih lanjut dijelaskan dalam tafsir Al-Quran dalam Shihab (2002:460) mengatakan :

“Ayat diatas mengatakan: *Dan* kami juga telah mengutus Ibrahim menjadi Rasul sebagaimana kami mengutus Nuh. Ujian yang dihadapinya pun beraneka ragam. Ingat dan ingatkanlah ketika ia berkata kepada kaumnya: “Sembah dan patuhilah Allah dalam segala yang diperintahkan-Nya dan bertakwalah kepada-Nya, yakni hindari segala sesuatu yang dapat mengundang siksa-Nya. Yang demikian itu, yakni kepatuhan dan ketakwaan adalah lebih baik bagi, daripada segala sesuatu; jika kamu mengetahui, pastilah kamu mengidahkan tuntunan ini, dan jika kamu tidak mengindahkannya maka kamu adalah orang-orang yang tidak memiliki sedikit pengetahuan pun”.

Misi bagi suatu perusahaan adalah suatu penggambaran bisnis apa yang sedang dan akan dijalankan oleh perusahaan, serta tujuan kualitatif apa yang ingin dicapai perusahaan melalui keberadaannya di bidang bisnis tersebut (Solihin, 2012:18).

Misi adalah suatu tujuan utama (fundamental purpose) yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lain dalam bidang yang sejenis dan menjelaskan cakupan operasionalnya dalam bentuk produk dan pasar(Pearce & Robinson, 1997:55).

Misi merupakan hasil akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan dan memiliki tenggang waktu yang sangat panjang untuk mencapainya. Selain itu, misi perusahaan digambarkan secara kualitatif (lebih menunjukkan sifat atau the nature of things) daripada ukuran (the measure of things).

Misi dalam ajaran islam dapat pula dilihat dari ajaran yang dibawa dan dipraktikkan oleh nabi Muhammd SAW. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan dengan sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya, 21:107).

Lebih lanjut dijelaskan dalam tafsir Shihab (2002:518) mengatakan:

“Redaksi ayat di atas sangat singkat, tetapi dia mengandung makna yang sangat luas. Hanya dengan lima kata yang terdiri dari dua puluh lima huruf – termasuk huruf penghubung yang terletak pada awalnya – ayat ini menyebut empat hal pokok. 1) Rasul/utusan Allah dalam hal ini Nabi Muhammad SAW., 2) yang mengutus beliau dalam hal ini Allah, 3) yang diutus kepada mereka (al-alamina), serta 4) risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya yang rahmat yang sifatnya sangat besar sebagaimana dipahami dari bentuk nakirah/indifinitif dari kata tersebut. Ditambah lagi dengan menggambarkan ketercakupan sasaran dalam semua waktu dan tempat.”

Misi kerahmatan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya dapat dilihat dari misi ajaran Islam yang dibawanya sebagaimana telah disebutkan diatas melainkan juga terlihat dalam praktik kehidupan nabi Muhammad yang dikenal dengan seorang yang sangat sayang kepada umatnya dan kepada manusia pada umumnya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita juga harus menerapkan misi yang diajarkan itu kedalam kehidupan sehari-hari.

2.2.2.2 Penilaian Internal dan Eksternal

2.2.2.2.1 Internal

Menurut David (2006:176) merupakan kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam area fungsional bisnis dan semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan, kekuatan dan kelemahan internal digabungkan dengan peluang dan ancaman eksternal serta misi yang jelas akan menghasilkan landasan untuk menetapkan tujuan dan strategi.

Untuk memahami penilaian internal Pearce & Robinson (1997:229) mengatakan :

“Landasan yang paling penting dalam pemahaman analisis internal adalah pengertian mengenai kecocokan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan dengan peluang dan ancaman yang ada di lingkungan. Memahami pemikiran yang sederhana ini memungkinkan kita melihat peran analisis internal dalam mengembangkan strategi yang tepat. Landasan ini sering disebut analisis SWOT.”

1. Strength (Kekuatan)

Menurut Pearce & Robinson (1997:230) peluang adalah suatu hal penting dimana terdapat sebuah situasi yang menguntungkan untuk perusahaan atau organisasi.

2. Weakness (Kelemahan)

Kelemahan adalah keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki perusahaan atau organisasi dalam sumber daya, keterampilan dan

kapabilitas secara serius yang akan menghambat kinerja perusahaan atau organisasi (Pearce & Robinson, 1997:231).

2.2.2.2.2 Eksternal

Selanjutnya, lingkungan eksternal adalah segala sesuatu yang berasal dari luar dan tidak berhubungan dengan situasi oprasional perusahaan (Pearce & Robinson, 1997:93). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ada 5 faktor yang dinilai dari lingkungan eksternal yaitu Faktor Ekonomi, Faktor Sosial, Faktor Politik, Faktor Teknologi dan Faktor Ekologi.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi suatu perusahaan, serta melihat keadaan ekonomi nasional maupun internasional yang akan mempengaruhi arah kebijakan nanti (Pearce & Robinson, 1997:93).

Faktor ekonomi juga bisa berpengaruh secara langsung terhadap berhasil atau tidaknya suatu strategi perusahaan. Sebagai contoh ketika naiknya suku bunga, maka biaya operasi perusahaan juga akan meningkat.

2. Faktor Sosial

Faktor sosial yang dimaksud adalah kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup masyarakat yang ada di lingkungan eksternal, yang

berangkat dari pengaruh kultur, domografi, agama, pendidikan dan etnis (Pearce & Robinson, 1997:97).

Faktor sosial akan membentuk cara hidup, cara bekerja, cara produksi dan cara konsumsi orang terhadap suatu barang atau jasa. Faktor sosial juga bisa menciptakan konsumen yang berbeda sehingga akan tercipta pula pasar baru untuk suatu produk atau jasa (David, 2006:112).

3. Faktor Politik

Faktor politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan politik, pemerintah dan peraturan (undang-undang) yang berlaku di suatu negara. Fator politik juga akan menjadi parameter legal dan regulasi perusahaan (David, 2006:116).

Arah dan stabilisasi politik suatu negara sangat berpengaruh terhadap pertimbangan manajer dalam membuat/merumuskan dan memutuskan strategi perusahaan (Pearce & Robinson, 1997:97).

4. Faktor Teknologi

Adaptasi yang dilakukan perusahaan terhadap perubahan teknologi akan memunculkan kemungkinan terciptanya produk baru, penyempurnaan produk yang sudah ada atau penyempurnaan dalam teknik produksi dan pemasaran (Pearce & Robinson, 1997:99-100).

Perkembangan teknologi dapat berpengaruh secara cepat dan langsung terhadap perusahaan atau organisasi karena bisa secara cepat

merubah standarisasi dan fleksibilitas perushanaan dalam melakukan kegiatannya (David, 2006:120-121).

5. Faktor Ekologi

Faktor ekologi adalah semua hal yang menyangkut tentang air, tanah dan udara. Perubahan terhadap 3 hal itu akan berpengaruh terhadap perusahaan atau organisasi. Sebagai contoh efek rumah kaca atau pulusi udara (Pearce & Robinson, 1997:100-101).

2.2.2.3 Analisis SWOT

SWOT adalah persamaan/akronim dari kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) dari lingkungan eksternal perusahaan. Menurut David (2006:8), ia mengatakan:

“Semua organisasi mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam areal fungsional bisnis, tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau lemahnya dalam semua area bisnis. Kekuatan/kelemahan internal, digabungkan dengan peluang/ancaman dari eksternal dan pernyataan misi yang jelas, menjadi dasar untuk penetapan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi ditetapkan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan”.

Analisa SWOT merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis atau proyek yang mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang mendukung dan yang tidak untuk mencapai tujuan tersebut.

Nabi Muhammad saw sesuai dengan sejarah kehidupannya menghadapi berbagai situasi yang berbeda-beda dalam melakukan dakwahnya. Dari sudut pandang manajemen strategis, khususnya dengan menggunakan analisis SWOT, maka pilihan ada 4 macam kondisi berbeda yang dihadapi oleh Nabi Muhammad saw (Antariksa, 2017:32).

Penjelasan dan pemaparan dari keempat elemen tersebut akan dikaji dalam sub-bab berikut ini :

1. Strength (Kekuatan)

Kekuatan adalah suatu sumber daya, keterampilan dan keunggulan yang dimiliki perusahaan atau organisasi, serta keunggulan atau kelebihan itu tidak dimiliki pihak lain (Pearce & Robinson, 1997:231).

2. Weakness (Kelemahan)

Kelemahan adalah keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki perusahaan atau organisasi dalam hal sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja perusahaan atau organisasi (Pearce & Robinson, 1997:231).

3. Opportunites (Peluang)

Menurut Pearce & Robinson (1997:230) peluang adalah suatu hal penting dimana terdapat sebuah situasi yang menguntungkan untuk perusahaan atau organisasi.

4. Traets (Ancaman)

Ancaman merupakan keterbalikan dari peluang yaitu situasi yang tidak menguntungkan bagi keberlangsungan perusahaan atau organisasi yang berasal dari lingkungan luar (Pearce & Robinson, 1997:230).

Setelah mengetahui apa itu SWOT organisasi kita, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terkait. Analisis SWOT adalah sebuah alat pencocokan penting yang membantu para manajer dapat mengembangkan strategi, analisis ini terdiri dari empat jenis tahap strategi, yaitu (David, 2006:284-286):

Tabel 2.2 Matriks SWOT

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
PELUANG (O)	Strategi untuk Memanfaatkan peluang untuk mendayagunakan kekuatan. (Strategi S-O)	Strategi untuk Memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan (Strategi W-O)
ANCAMAN(T)	Strategi untuk Mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan. (Strategi S-T)	Strategi untuk Menghindari ancaman sekaligus melindungi kelemahan (Strategi W-T)

Sumber : David (2006)

1. Strategi SO (Strengths-Opportunities) adalah cara memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. kondisi ini merupakan kondisi yang diharapkan/dininginkan oleh perusahaan, dimana kekuatan internal perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mengambil peluang eksternal.
2. Strategi WO (Weaknesses-Opportunities) Bertujuan untuk memperbaiki dan menutupi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal.

Salah satu alternative strategi WO adalah merekrut dan melatih karyawan atau anggota dengan kemampuan teknis yang dibutuhkan.

3. Strategi ST (Strengths-Threats) Menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal.
4. Strategi WT (Weaknesses-Threats) Merupakan taktik defensif atau bertahan yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal perusahaan atau organisasi serta menghindari ancaman dari eksternal. Sebuah organisasi yang menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal benar-benar dalam posisi yang membahayakan. Kenyataan, perusahaan semacam itu mungkin harus berjuang untuk bertahan hidup, melakukan merger, pengurangan, menyatakan diri bangkrut, atau memilih likuidasi.

2.2.2.4 Implementasi Strategis

Implementasi strategi adalah langkah dimana organisasi menerapkan perencanaan strategi yang sudah dirumuskan sebelumnya (David, 2010). Selanjutnya dijelaskan oleh David (2006:5) ia mengatakan :

“Implementasi strategi adalah langkah dimana strategi yang telah melalui identifikasi dan pemilihan secara ketat terkait faktor lingkungan internal dan eksternal, serta menyesuaikan dengan tujuan organisasi, mulai diterapkan dan diimplementasikan kedalam kebijakan-kebijakan intensif, dimana setiap divisi dan fungsional organisasi berkolaborasi dan bekerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing“.

Selanjutnya Menurut David (2006:278) mengatakan :

“Tahap analisis dan memilih strategi adalah proses dimana mencoba untuk menentukan alternatif tindakan yang dapat

memungkinkan perusahaan mencapai tujuannya dengan cara terbaik. Strategi, tujuan dan misi perusahaan digabungkan dengan informasi adari internal dan eksternal, memberikan dasar untuk menghasilkan dan mengevaluasi strategi alternatif yang layak”.

Para penyusun strategi tidak dapat mempertimbangkan semua alternatif yang bisa menguntungkan perusahaan, karena akan sangat banyak tindakan yang akan dilakukan dan terbatasnya cara untuk menerapkan tindakan-tindakan tersebut. Oleh karena itu, serangkaian strategi alternatif yang paling menarik dan bisa dikelola, harus dikembangkan (David, 2006:279).

Strategi terbaik yang mencerminkan pemikiran setia anggota kelompok. Dijelaskan lebih lanjut pada (David, 2006:279):

“Mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif strategi harus melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya mengembangkan pernyataan visi dan misi, menjalankan audit eksternal, dan menjalankan audit internal. Perwakilan dari masing-masing departemen dan divisi perusahaan harus diikutsertakan dalam proses ini, seperti halnya dalam perumusan strategi sebelumnya”.

2.3 Tinjauan Wisata Halal

2.2.1 Wisata.

Kata “wisata” berarti kata darma wisata atau pariwisata. Pendapat lain menyatakan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan hiburan atau rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pariwisata

didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas, serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah (Djakfar, 2017:26).

Arti “pariwisata” belum banyak diungkapkan dan dijelaskan oleh para ahli bahasa dan pariwisata di Indonesia. Kata “pariwisata” berasal dari dua suku kata, yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan *wisata* berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan atau bepergian untuk melakukan rekreasi yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. Pariwisata adalah padanan Bahasa Indonesia untuk istilah *tourism* dalam Bahasa Inggris (Muljadi, 2009:6).

2.2.2 Wisata Halal.

Adapun kata halal, adalah kata yang sudah akrab dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat Indonesia sebagai lawan dari kata haram dalam ajaran islam. Term halal menurut Qardhawi didefinisikan sebagai “That which is permitted, with respect to which no restriction exists, and the doing of which the law-giver, Allah, is allowed. Sebab itu term halal mempunyai arti “permissible” atau ‘diizinkan atau diperbolehkan” menurut ajaran islam. Selain itu halal juga diartikan sebagai “one human action (al-ahkam la khamsah) that categorizes the morality of human action in Islam, others being Fard (compulsory), Mustahab (recommended), Makruh (dislike) dan Haram (forbidden) (Djakfar, 2017:28).

Halal adalah istilah yang mencakup semua hal yang tidak dilarang dan sesuai dengan ajaran islam, baik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW

dalam kehidupan sehari-hari, maupun yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran (Boğan & Sarıışık, 2018:3).

Halal disebutkan dalam kitab suci Al-Quran diantaranya yaitu, Surat Al-Baqarah ayat 168, Surat Al-Ma'idah ayat 88, Surat Al-Anfal ayat 69 dan Surat An-Nahl ayat 114 (Boğan & Sarıışık, 2018: 4).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah, 2:168).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S Al-Ma'idah, 5:88).

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S Al-Anfal, 8:69).

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.” (Q.S An-Nahl, 16:114).

Selanjutnya dijelaskan apabila istilah halal disandingkan dengan istilah destinasi wisata, maka akan mengandung arti bahwa wisata halal adalah tujuan wisata yang baik dilakukan dan dijadikan pilihan menurut perspektif ajaran islam

karena dalam atmosfer wisata ini diupayakan terhindar dari kontaminasi apa pun saja yang mengharamkan. Karena itu wisata halal yang seringkali disebut dengan istilah wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip ajaran dan syariah islam. Sedangkan yang dimaksud dengan destinasi wisata halal adalah lingkungan geografis yang berada dalam satu atau lebih dari wilayah lingkungan administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terhubung dan melengkapi untuk mewujudkan kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Istilah wisata halal memiliki makna segala kegiatan wisata yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Djakfar, 2017:114). Sebab itu untuk memperjelas apa saja sejatinya lingkungannya yang terlarang itu, maka tentunya dalam hal ini perlu penjabaran yang lebih detail (rinci) dari fiqih.

Wisata halal adalah penyediaan produk, paket wisata dan layanan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim sesuai ajaran agama Islam (Faridah & Satriana, 2018:34).

Pariwisata halal adalah terkait dengan semua yang diizinkan dan dapat diterima di hukum islam dalam semua aspek perjalanan wisatawan muslim. Wisata halal juga mendukung wisatawan muslim yang ingin mematuhi hukum Islam dengan destinasi wisata yang menawarkan layanan sesuai dengan standar Islam dalam hal makanan dan minuman, rekreasi, pakaian, dan lain-lain (Harahsheh dkk., 2019:6).

Wisata halal dapat dipahami sebagai penawaran paket dan tujuan wisata yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan muslim dan keinginan wisatawan muslim, secara langsung dipengaruhi oleh ketaatan wisatawan muslim terhadap agama, meliputi komponen seperti transportasi, akomodasi, makanan dan semua jenis layanan wisata lainnya (Vargas-Sánchez & Moral-Moral, 2019:4).

Wisata halal didefinisikan sebagai tipe pariwisata yang telah muncul sebagai akibat dari persepsi individu untuk bepergian atau berwisata yang mendapatkan persetujuan dari Tuhan (Allah SWT) dan sesuai dengan Al-Quran dan sunah (Boğan & Sarıışık, 2018:6).

Pariwisata halal mengacu pada perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi, memanfaatkan waktu luang dan tujuan sosial, meskipun motivasi untuk bepergian belum tentu spiritual, tetapi ada keinginan untuk berperilaku dengan cara yang dianggap diizinkan atau halal yang sesuai dengan ajaran Islam (Vargas-Sánchez & Moral-Moral, 2019:4).

Kota wisata halal menurut Chookaew, Chanin, Charatarawat, Sriprasert & Nimpaya (2015) dapat disimpulkan bahwa suatu daerah kota atau negara yang memiliki destinasi wisata yang berfokus pada pelaksanaannya yang mengedepankan pelayanan yang berbasis standar syariah umat muslim, serta didukung dengan adanya fasilitas pendukung atau jasa pendukung yang memenuhi standar operasional menurut syariah islam.

Dalam Ketentuan fatwa yang ditentukan oleh MUI, wisata syariah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Dalam fatwa ini yang dimaksud bahwa:

1. Wisata adalah kegiatan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan hiburan, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata serta didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
5. Destinasi Wisata Syariah adalah lingkungan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terhubung demi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang atau masyarakat yang melakukan wisata.
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersil yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok masyarakat, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata, namun sesuai dengan prinsip syariah.

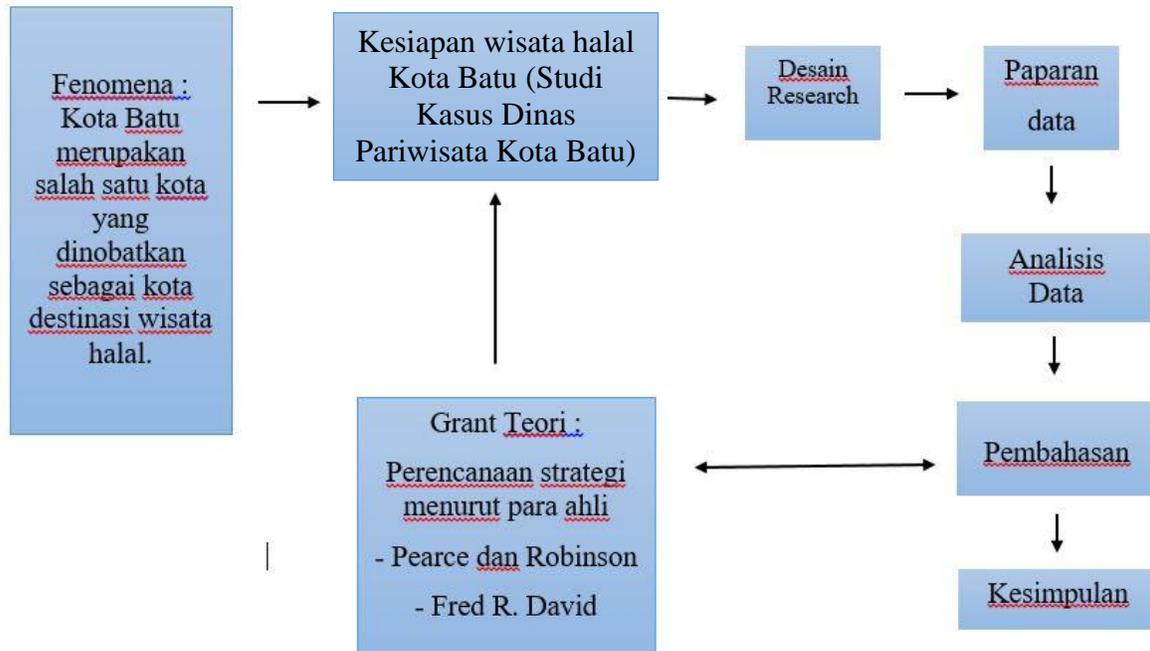
8. Pemandu wisata adalah orang yang memandu atau memberikan arahan dalam pariwisata.
9. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang pariwisata.
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan serta minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lain dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
12. Terapis adalah pihak yang melakukan jasa spa, jasa sauna, dan jasa *massage*.
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu yang sudah disepakati dengan pembayaran atau upah.
14. Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad pemberian hak yang disertai dengan ujarah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) berupa bonus tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).

Indikator wisata halal menurut Chookaew, Chanin, Charatarawat, Sriprasert & Nimpaya (2015) mengatakan ada 8, yaitu :

1. Layanan yang diberikan kepada para wisatawan harus sesuai dengan prinsip-prinsip islam sepanjang wisata.
2. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan rasa hormat terhadap prinsip-prinsip islam.
3. Pengaturan semua kegiatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip islam.
4. Tempat tujuan atau akomodasi penginapan harus sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Misalnya, di dalam akomodasi penginapan harus memiliki tanda arah kiblat. Selain itu, kran untuk wudhu juga harus dipasang di kamar mandinya.
5. Restoran harus mengikuti standar internasional layanan halal dan tidak mengandung makanan atau minuman yang diharamkan.
6. Layanan transportasi harus memiliki sistem perlindungan keamanan.
7. Ada tempat yang disediakan untuk semua wisatawan Muslim melakukan kegiatan keagamaan seperti ibadah shalat.
8. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama islam.

2.4 Kerangka Berfikir

Berikut merupakan kerangka berfikir peneliti dengan judul penelitian “*Kesiapan Wisata Halal Di Kota Batu : Perspektif Perencanaan Strategi (Studi Kasus Di Dinas Pariwisata Kota Batu)*”.

Bagan 2.2 Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Alasan peneliti memutuskan untuk menggunakan jenis penelitian kualitatif karena data yang ada pada penelitian ini adalah data yang berupa narasi yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan penelusuran dokumen.

Metode Penelitian Kualitatif adalah metode (jalan) penelitian sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah saat hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, tetapi makna (segi kualitas) dari fenomena yang dialami (Prastowo, 2011:24).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap sebuah organisasi, lembaga atau fenomena tertentu (Arikunto, 2006:142). Penelitian ini mengambil pendekatan studi kasus dikarenakan data yang diambil berupa data hasil wawancara yang mendalam dan terperinci. Selain itu, pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini dilakukan secara terperinci dan mendalam.

3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pariwisata Kota Batu dengan narasumber Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Batu.

Subjek penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian yang akan melihat kesiapan Dinas Pariwisata Kota Batu untuk menjadi destinasi wisata halal, hal ini dikaji lebih lanjut oleh Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Batu.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini, penulis membedakan menjadi 3 teknik pengumpulan data, yang terdiri dari :

3.3.1 Metode Wawancara

Metode Wawancara adalah proses mendapat keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara (Bungin, 2010:108).

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Kota Batu yaitu Ibu Hasanatul Mardiyah, salah satu pegawai Dinas Pariwisata Kota Batu, kepada salah satu masyarakat Kota Batu dan salah satu pelaku usaha wisata Kota Batu.

Tabel 3.1 Wawancara

Fokus Penelitian	Informan	Konteks Wawancara
Kesiapan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam mewujudkan wisata halal di Kota Batu dalam perspektif perencanaan strategi.	Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Batu.	Perencanaan strategi 1-3 tahun kedepan mengenai wisata halal.

3.3.2 Metode Observasi

Observasi atau pengamatan menurut Bungin (2010:115) adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Sedangkan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.

Melihat pengertian di atas, observasi yang peneliti lakukan pada penelitian kali ini adalah melakukan pengamatan dibeberapa objek wisata yang ada di Kota Batu terhadap konsep wisata halal.

Tabel 3.2 Observasi

Fokus Penelitian	Fenomena	Data
Kesiapan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam mewujudkan wisata halal di Kota Batu dalam perspektif	<ul style="list-style-type: none"> – Kesiapan destinasi wisata (pelaku usaha wisata) untuk menerapkan konsep wisata halal. – Kesiapan masyarakat Kota Batu untuk 	<ul style="list-style-type: none"> – Data kesiapan penerapan wisata halal di Kota Batu. – Data kesiapan masyarakat Kota Batu untuk menerapkan konsep wisata halal.

perencanaan strategi.	menerapkan konsep wisata halal. – Kesiapan infastrukrut pendukung seperti masjid dan mushollah untuk mengahapi penerapan konsep wisata halal.	– Data jumlah masjid dan mushollah.
-----------------------	--	-------------------------------------

3.3.3 Metode Dokumentasi

Menurut Bungin (2010:121-122) metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis baik domunen yang berbentuk dokumen resmi dari pemerintah, dokumen pribadi, data yang tersimpan di website dan lain-lain.

Berangkat dari pengertian di atas, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan Dinas Pariwisata Kota Batu, dokumen DSN-MUI, mengumpulkan dari website resmi Pemerintah Kota batu dan website yang dapat dipercaya lainnya seperti website berita.

Tabel 3.3 Dokumentasi

Fokus Penelitian	Jenis Dokumen	Data
Kesiapan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam mewujudkan wisata halal di Kota Batu dalam perspektif	– Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2017-2022. – Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. – Destinasi wisata.	– Perencanaan strategi Dinas Pariwisata Kota Batu 1-3 tahun kedepan. – Persyaratan wisata halal.

perencanaan strategi.	– Masjid dan mushollah. – Hotel dan villa.	– Data destinasi wisata – Data jumlah masjid dan mushollah. – Data jumlah hotel dan villa.
-----------------------	---	--

3.4 Data dan Jenis Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh, dalam hal ini peneliti menetapkan sumber data berasal dari Dinas Pariwisata Kota Batu, observasi di lapangan dan dokumen-dokumen (Arikunto, 2002:120).

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya (Sumarsono, 2004). Dari pengertian ini peneliti menentukan bahwa data primer penelitian terdiri dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata Kota Batu dan observasi lapangan.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian (Sumarsono, 2004). Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari data informasi yang berasal dari website resmi maupun berita, dokumen resmi pemerintahan atau instansi terkait.

3.5 Analisis Data

Menurut Prastowo (2011:238) analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan lainnya,

sehingga dapat ditemukan kesamaan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerjanya yang sesuai dengan data yang sudah ada.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Spradley. Metode spradley, yaitu :

1. Analisis Domain

Analisis domain pada hakikatnya adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian yang sudah didapat sebelumnya dan dilakukan pengujian dari setiap domainnya (Spradley, 1997:139).

Di sini, dalam permulaan penelitian, peneliti mengumpulkan data apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran umum dari kesiapan Kota Batu dalam menerapkan konsep wisata halal dengan studi kasus di Dinas Pariwisata Kota Batu. Semua kemungkinan dari data yang bisa digunakan dalam penelitian dikumpulkan satu per satu. Kemudian data yang berhasil dikelompokkan berdasarkan kebutuhan peneliti dan dilakukan pengamatan terhadap data tersebut, sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan awal.

Setelah didapatkan gambaran secara umum, peneliti mulai melanjutkan ketahap selanjutnya, yaitu analisis taksonomi.

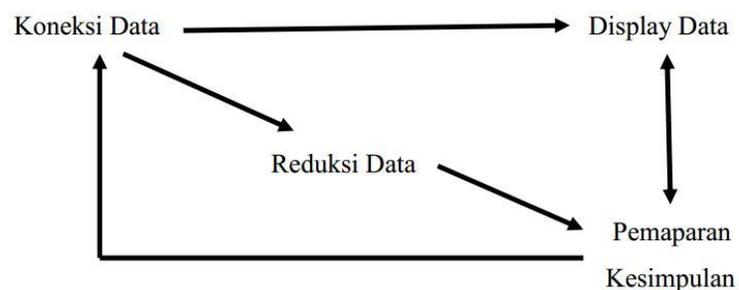
2. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi merupakan penjabaran yang lebih terperinci dari domain yang dipilih (Spredley, 1997).

Di sini, peneliti mulai melakukan pengamatan lebih mendalam terhadap data yang telah disusun sebelumnya. Pengamatan lebih terfokus kepada masing-masing kelompok, sehingga mendapatkan gambaran lebih terperinci dari masing-masing data yang telah terkumpul. Apabila data yang terkumpul sebelumnya dianggap kurang, peneliti akan melakukan pengumpulan data kembali dengan kriteria data yang lebih spesifik dan mendalam..

Pada dasarnya analisis data kualitatif dilakukan secara beriringan dengan proses pengumpulan data (Basrowi & Suwandi, 2008:209). Teknik analisis data menurut Miles & Huberman digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Analisis Miles & Huberman



Sumber : Analisis Miles & Huberman (1992) dalam Basrowi & Suwandi (2008:209)

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, memusatkan perhatian, pengabstraksian dan mentransformasikan data mentah dari lapangan menjadi data yang lebih mudah untuk diolah dan dipahami.

Reduksi data yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan pengelompokan data yang sudah didapatkan di Dinas Pariwisata Kota Batu dan di lapangan. Pada penelitian awal, peneliti mencari informasi terkait apa saja yang diperlukan dalam penelitian, data tersebut masih berbentuk data umum. Selanjutnya peneliti melakukan penelusuran secara mendalam tentang data yang dibutuhkan tadi dan dikelompokkan berdasarkan kategorinya masing-masing. Pengumpulan data yang peneliti lakukan meliputi data hasil wawancara, data penelusuran dokumen resmi, data penelusuran internet dan data observasi.

3.5.2 Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data adalah sekelompok informasi yang memberikan gambaran dan memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindak lanjut. Bentuk penyajiannya bisa berupa teks naratif, matriks, grafik dan penarikan kesimpulan, jaringan dan bagan. Ini bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menganalisis data yang sudah dikumpulkan.

Pada penelitian ini, penyajian data akan dinyatakan kedalam bentuk tabel-tabel dan diagram menggunakan data yang sudah disusun berdasarkan proses reduksi data sebelumnya.

3.5.3 Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian kecil dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat juga diverifikasi selama penelitian berjalan dan di uji kebenarannya sehingga validitasnya terjaga. Pada tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya menjadi temuan penelitian, dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang terhadap data yang ada, mengelompokkan data yang telah dibentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian secara lengkap dan dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada.

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan validasi kepada setiap data yang didapat, apakah data yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak. Kemudian dari setiap data yang didapat akan menjadi sumber untuk menarik kesimpulan-kesimpulan kecil, sehingga pada akhir penelitian akan didapatkan sebuah kesimpulan yang merujuk pada fokus penelitian.

Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti didasarkan pada data yang sudah terkumpul, baik data utama maupun data pendukung. Dalam penarikan kesimpulan, data yang paling mendukung adalah data hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Batu dan penelusuran dokumen resmi yaitu dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2017-2022

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Wilayah Kota Batu terletak di dataran tinggi di lereng pegunungan dengan ketinggian 700 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun yang dilacak keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang kapan nama “Batu” mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan tersebut.

Berdasarkan dokumen resmi Pemerintah Kota Batu, sejak abad ke-10, wilayah Kota Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayah Kota Batu adalah daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga didukung oleh keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan.

Dari beberapa dokumen yang sudah peneliti temukan sebagai mana dijabarkan pada Bab 1, penamaan Kota Batu menurut pemuka masyarakat setempat Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu, yang pada akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau Batu sebagai sebutan yang digunakan untuk sebuah kota dingin di Jawa Timur.

Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif pada 6 Maret 1993. Pada tanggal

17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. (WongBatu, 2020)

Dalam penelitian ini, Dinas Pariwisata Kota Batu akan menjadi objek penelitian sekaligus sumber utama dari data yang dikumpulkan. Dinas Pariwisata Kota Batu merupakan salah satu instansi yang ada dibawah pemerintahan Kota Batu. Kantor Dinas pariwisata Kota Batu terletak pada Balai Kota Among Tani, Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313. Untuk lebih spesifiknya, peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala bidang pengembangan produk pariwisata.

Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan produk pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Produk Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perencanaan program bidang pengembangan produk pariwisata.
2. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan produk pariwisata.
3. penyusunan standar operasional prosedur bidang pengembangan produk pariwisata.
4. pengendalian data informasi pengembangan produk pariwisata.
5. pembinaan potensi usaha kepariwisataan.
6. pengkajian rekomendasi ijin di bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek, dan daya tarik wisata, serta rekreasi dan hiburan umum.

7. pembinaan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, dan objek serta daya tarik wisata.
8. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait di bidang usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum.
9. Pembinaan sarana prasarana pariwisata untuk menunjang daya tarik wisata.
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan produk pariwisata.
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

4.2 Paparan Data Hasil Penelitian

4.2.1 Kesiapan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam Percepatan Wisata Halal

Berdasarkan penelusuran dokumen resmi Pemerintah Kota Batu yang tertuang dalam RENSTA (Rencana Strategis) Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2017-2022, dipaparkan bahwa dalam dokumen tersebut banyak memuat informasi terkait strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.

Namun, sejauh ini dinas pariwisata Kota Batu baru akan mengembangkan dalam hal percepatan wisata halal. Ini di karenakan Pemerintah Kota Batu belum membuat dan menjalankan rancangan tentang konsep wisata halal, sejauh ini Pemerintah Kota Batu khususnya Dinas Pariwisata masih sebatas melakukan sosialisasi tentang wisata halal kepada beberapa pelaku usaha wisata dan beberapa instansi terkait. Rancangan konsep wisata halal sebenarnya sudah dicanangkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, karena Kota Batu sudah menerima dan menandatangani MoU

dengan Kementerian Pariwisata tahun 2018 tentang rencana wisata halal. Tetapi rancangan kegiatan yang diajukan oleh Dinas Pariwisata kepada dewan masih belum mendapatkan persetujuan. Hal inilah yang menjadi penghambat belum berjalannya percepatan untuk mewujudkan wisata halal di Kota Batu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hasanatul Mardiyah Hs,SH.,MM selaku Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, beliau mengatakan *“untuk pertama, karena pemerintah Kota Batu membranding Kota Batu sebagai kota wisata, bersamaan dengan program kementerian Pariwisata dalam percepatan wisata halal, pemerintah kota Batu juga ingin mewujudkan wisata halal, hal ini juga akan berdampak pada kunjungan wisatawan nantinya, terutama dari wisatawan mancanegara”*. (wwcr, 31 Desember 2019)

Selanjutnya beliau mengatakan *“Keinginan dan impian Dinas Pariwisata Kota Batu yang pertama adalah semua destinasi wisata yang ada di kota Batu bisa melaksanakan program wisata halal ini, baik para pelaku usaha wisata maupun para pihak pendukung yang lain. Kedua, di daerah destinasi tidak ada anjing berkeliaran disekitarnya. Ketiga, di tempat makan atau cafe-cafe memiliki makanan dan minuman yang sudah bersertifikasi halal, jika memang tidak halal, harus ada pelabelan atau keterangan jika makanan atau minuman yang dijual tidak halal. Keempat, semua penginapan seperti hotel, villa, guest house, rumah singgah dan yang lainnya juga memberikan pelayanan yang syariah atau halal, seperti adanya kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Kelima, para penyedia biro perjalanan atau penyedia jasa perjalanan wisata juga memberikan layanan yang sesuai dengan kaidah syariah, misal jika dalam perjalanan ada terdengar adzan, maka para biro perjalanan ini memberikan kesempatan pada wisatawan untuk melaksanakan ibadah shalat”*. (wwcr, 31 Desember 2019)

Berdasarkan paparan dokumen dan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah yang terjadi saat ini di karenakan pemerintah Kota Batu belum membuat dan menjalankan rancangan tentang konsep wisata halal, sejauh ini Pemerintah Kota Batu khususnya Dinas Pariwisata

masih sebatas melakukan sosialisasi tentang wisata halal kepada beberapa pelaku usaha wisata dan beberapa instansi terkait.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hasanatul Mardiyah Hs,SH.,MM selaku Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, beliau mengatakan *“Rencana yang akan dilakukan oleh dinas pariwisata Kota Batu yaitu: pertama, sosialisasi kepada beberapa perwakilan pelaku wisata lainnya terkait program wisata halal. Kedua, sosialisasi dan kerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Kementerian Keagamaan Kota Batu, MUI dan lainnya terkait program wisata halal. Sebetulnya kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Batu selama ini sudah mendukung dalam program percepatan wisata halal, namun memang belum ada program yang benar-benar dilaksanakan untuk menangani percepatan wisata halal, selama ini sifatnya dengan menyisipkan sedikit sosialisasi pada kegiatan yang sudah ada”*. (wwcr, 31 Desember 2019)

Untuk kedepannya, Dinas Pariwisata akan bekerja sama dengan dinas terkait dalam menyusun program untuk wisata halal dengan membuat forum komunikasi. Selanjutnya meminta persetujuan walikota untuk melaksanakannya. Hal ini dilakukan karena program ini tidak bisa berjalan tanpa ada bantuan dan keterlibatan pihak lain.

Demi mempersiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan percepatan wisata halal, dinas pariwisata Kota Batu sudah melakukan beberapa kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata di kota lain, salah satunya yaitu Sumatera Barat, mereka sudah baik dalam melakukan percepatan wisata halal ini.

Selain itu, dinas pariwisata Kota Batu juga harus menimbang faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor internal dan eksternal.

Kegiatan di Dinas Pariwisata periode 2017-2022 difokuskan pada peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui Desa Wisata. Peran Dinas Pariwisata adalah sebagai pembina. Diantaranya melalui peningkatan kapasitas SDM masyarakat dengan mengadakan bimtek dan pelatihan bagi masyarakat dan pelaku usaha, pembentukan komunitas masyarakat sadar wisata, pembentukan komunitas masyarakat ekonomi kreatif, dan kampanye sapta pesona.

Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas dan kuantitas wisata yang harus ditingkatkan	Rendahnya kualitas dan kuantitas daya tarik dan usaha jasa pariwisata	Rendahnya kesadaran pelaku usaha jasa pariwisata dalam standarisasi
			Minimnya pemanfaatan potensi local dalam pengembangan daya tarik wisata
		Rendahnya daya saing SDM pariwisata	Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM pariwisata
			Rendahnya kesadaran SDM pariwisata dalam sertifikasi kompetensinya
Kurang optimalnya kunjungan wisatawan	Promosi dan kerjasama pariwisata yang belum optimal		
	Belum tersedianya informasi potensi pariwisata yang akurat dan akurat		

2	Peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan harus ditingkatkan	Pelestarian nilai budaya yang masih kurang optimal	Belum tersedianya rencana induk pengembangan kebudayaan daerah
			Belum tersedianya sistem informasi kebudayaan daerah

Sumber : Renstra Dinas Pariwisata Kota Batu Tahun 2017-2022

Visi Kota Batu tahun 2018-2022 adalah “**Desa Berdaya Kota Berjaya** Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra **Agro Wisata Internasional** Yang **Berkarakter, Berdaya Saing** Dan **Sejahtera**”.

Untuk menelaah visi Kepala Daerah tersebut terkait dengan pembangunan sektor pariwisata, maka dijabarkan dalam 5 bagian utama, yaitu :

1. **Desa Berdaya Kota Berjaya** : dititik beratkan pada kemandirian dan kemajuan desa.
2. **AgroWisata Internasional** : AgroWisata yang dimaksud bukanlah pariwisata berbasis pertanian, melainkan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Dan kata internasional mengacu pada standarisasi kualitas produk pariwisata.
3. **Berkarakter** : pembangunan di Kota Batu khususnya sector pariwisata harus memperhatikan lingkungan dan mempertahankan ciri khas budaya yang ada.

4. **Berdaya saing** : pengembangan pariwisata harus didukung dengan SDM Pariwisata yang berkualitas.
5. **Sejahtera** : peningkatan kesejahteraan masyarakat baik jasmani maupun rohani.

Selain itu Dinas Pariwisata memfasilitasi pembentukan desa wisata dengan membangun sarana prasarana pendukung, memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dengan memanfaatkan dana CSR, menyusun pedoman desa wisata agar pembangunan Desa Wisata sinergi dengan pemanfaatan wilayah Kota dan tidak mengesampingkan pelestarian lingkungan.

Dinas Pariwisata juga berperan dengan mencari pangsa pasar yang potensial untuk memasarkan produk desa wisata, disamping juga dengan mendatangkan kunjungan ke Desa Wisata melalui eventevent kebudayaan dan pariwisata.

Melalui bidang kebudayaan, Dinas Pariwisata berperan dalam memajukan kebudayaan lokal daerah yang sejalan dengan fokus pengembangan Desa Wisata berbasis kearifan lokal. Dengan memanfaatkan nilai tradisi yang ada dan diangkat menjadi event Kota, dan dipadu dengan kreatifitas kelompok kesenian menjadikan keunikan tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Kota Batu. Situs, dan benda purbakala yang ada, memiliki potensi untuk dapat dikembangkan menjadi Daya Tarik Wisata

(DTW) baru yang sekaligus dapat menambah ketertarikan wisatawan untuk mengenal Kota Batu.

Namun dalam hal ini dinas pariwisata Kota Batu baru membuat dan menjalankan kegiatan yang bersifat umum. Berdasarkan Rencana Strategis yang terlampir, sejauh ini masih belum ada satupun program kegiatan yang dibuat dan akan dilaksanakan dalam menangani percepatan wisata halal di Kota Batu.

Semua faktor eksternal yang berkaitan dengan percepatan wisata halal di Kota Batu seperti faktor pendukung wisata halal (rumah makan/restoran, masjid, musholla, hotel, vila, home stay dan lainnya).

Tabel 4.2 Jumlah masjid dan musholla di Kota Batu

No	Masjid	Musholla
1	170	201

Sumber : (Sistem Informasi Masjid Kementian Agama, 2020)

Tabel 4.3 Jumlah obyek wisata di Kota Batu

Kecamatan	Objek Wisata Budaya			Objek Wisata Alam			Objek Wisata Buatan		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
A Kecamatan Batu		1	5		7	5		15	21
1 Sumberjo		0			0			0	
2 Songgokerto		1			2			5	
3 Pesanggrahan		0			1			1	
4 Ngaglik		0			1			2	
5 Sisir		0			0			2	
6 Sidomulyo		0			0			0	
7 Temas		0			1			0	
8 Oro Oro Ombo		0			2			5	

B	Kecamatan Bumiaji		0	1		7	3		8	14
1	Giripurno		0			0			0	
2	Pandanrejo		0			1			0	
3	Bumiaji		0			1			0	
4	Bulukerto		0			0			0	
5	Punten		0			0			0	
6	Tulungrejo		0			1			8	
7	Sumbergondo		0			0			0	
8	Gunungsari		0			2			0	
9	Sumberbrantas		0			2			0	
C	Kecamatan Junrejo		0	1		4	4		3	6
1	Beji		0			1			2	
2	Torongrejo		0			0			0	
3	Pendem		0			0			0	
4	Mojorejo		0			1			0	
5	Tlekung		0			1			1	
6	Junrejo		0			1			0	
7	Dadaprejo		0			0			0	
	Kota Batu		1	7		18	12		26	41

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Batu

Tabel 4.4 Jumlah rumah makan dan restoran di Kota Batu

No	Tahun	Warung/kedai	Restoran
1	2017	824	43
2	2018	862	48

Sumber : BPS Kota Batu

Tabel 4.5 Jumlah hotel, villa dan home stay di Kota Batu

No	Hotel	Home stay	Vila
1	79	332	411

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Batu

Melihat pada tabel di atas, sebagai infrastruktur pendukung, Kota Batu sebenarnya sudah siap untuk melakukan percepatan wisata halal. Seperti jumlah masjid dan musholla yang sudah siap dan memadai.

Faktor pendukung lain seperti penginapan, pelaku usaha pariwisata dan penyedia makanan juga sudah cukup memadai, hanya kurang mendapat sosialisasi dari pemerintah Kota Batu terutama dari dinas pariwisata Kota Batu terkait dengan percepatan wisata halal. Sosialisai ini diperlukan karena sampai sekarang masih banyak yang belum tahu akan adanya percepatan wisata halal di Kota Batu.

4.2.2 Temuan hasil penelitian

4.2.2.1 Visi dan Misi

Dinas Pariwisata Kota Batu tidak memiliki visi dan misi tersendiri, Dinas Pariwisata bekerja dibawah kepemimpinan kepala daerah, sehingga visi dan misi yang dinas pariwisata emban adalah visi dan misi dari kepala daerah Kota Batu.

Dari visi kapala daerah ini, peneliti belum menemukan visi yang spesifik terkait dengan percepatan wisata halal di Kota Batu. Sejauh ini visi yang dipegang oleh Dinas Pariwisata Kota Batu adalah visi yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kota Batu. Visi tersebut adalah “**Desa Berdaya Kota Berjaya** Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra **Agro Wisata Internasional** Yang **Berkarakter, Berdaya Saing** Dan **Sejahtera**”.

Untuk mewujudkan visi kepala daerah tersebut, maka dijabarkan dalam misi Kota Batu :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal.
2. Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia.
3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata.
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional.

Sedangkan untuk misi, Dinas Pariwisata Kota Batu mendukung misi pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan budaya lokal. Untuk mewujudkan misi tersebut, maka Dinas Pariwisata memiliki program prioritas memajukan kebudayaan lokal daerah.

Selain itu, Dinas Pariwisata juga mendukung misi yang ketiga, yaitu untuk Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata. Untuk mendukung misi tersebut, Dinas Pariwisata memiliki program prioritas pengembangan Desa Wisata berbasis kearifan lokal. Melalui program ini, masyarakat diharapkan agar dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus

menjaga potensi dan keunikan lokal daerahnya. Dimana hal tersebut sejalan dengan program prioritas Dinas Pariwisata pada misi pertama.

4.2.2.2 Lingkungan Internal dan Eksternal

Untuk lingkungan internal di Dinas Pariwisata Kota Batu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, kesiapan pemerintah Kota Batu masih belum memiliki rencana strategis untuk menghadapi percepatan wisata halal di Kota Batu. Sejauh ini hanya baru dilakukan sosialisai yang sifatnya tidak teragendakan. Secara konseptual belum ditemukan secara spesifik dalam dokumen dan wawancara perencanaan strategis yang membahas secara khusus terkait wisata halal.

Hal ini juga didukung dengan tidak adanya rencana strategis yang dibuat oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, peneliti mengkonfirmasi dengan melakukan penelusuran dokumen resmi yang peneliti jadikan acuan, dokumen tersebut adalah Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Pariwisata kota batu. Dalam dokumen tersebut, peneliti tidak menemukan satupun rencana strategis yang membahas tentang percepatan wisata halal di Kota Batu.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masih belum ada komitmen dari pimpinan (dalam hal ini kepala daerah Kota Batu) untuk melakukan percepatan wisata halal di Kota Batu.

Jika dilihat dari lingkungan eksternal Dinas Pariwisata, kesiapan secara eksternal sebenarnya sudah cukup memadai untuk mendukung percepatan wisata halal di Kota Batu. Seperti dalam Tabel 4.2 disebutkan bahwa jumlah masjid sebanyak 170 bangunan dan jumlah musholla sebanyak 201 bangunan. Data tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan tempat ibadah bagi wisatawan muslim sudah tersedia.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, keberadaan tempat ibadah atau musholla bahkan masjid di dalam objek wisata sudah disediakan oleh pengelola, atau setidaknya dekat dengan objek wisata tersebut. Sebagai contoh Alun-Alun Kota Batu sebagai objek wisata buatan dan tempat berwisata kuliner di Kota Batu, memiliki lokasi yang bersebrangan dengan Masjid Agung An-Nuur.

Kesiapan masyarakat Kota Batu dalam menghadapi percepatan wisata halal juga sebenarnya sudah memenuhi, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat Kota Batu dengan ajaran islam. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada objek wisata sudah tidak ditemukan anjing berkeliaran, warung yang menjual makanan sudah memenuhi standar halal dan tidak menjual makanan atau minuman yang diharamkan.

Untuk tempat menginap seperti hotel, villa, home stay dan yang lain berdasarkan observasi peneliti sudah ada yang menerapkan prinsip syariah, namun ada juga yang belum.

4.2.2.3 Analisis SWOT

Sehubungan dengan hasil wawancara, observasi dan penelusuran dokumen yang sudah dilakukan, peneliti bisa menyimpulkan analisis SWOT sebagai berikut.

1. Strength (Kekuatan)

- a. Keadaan geografis merupakan keunggulan utama yang dimiliki Kota Batu sebagai nilai jual utama, dengan iklim cuaca yang sejuk dan pemandangan alam yang indah. Kota batu dipenuhi dengan berbagai wisata, baik wisata alam seperti air terjun, pemandian air panas, wisata petuk apel dan wisata buatan seperti Jatim park 1, 2, 3, BNS dan lain sebagainya.
- b. Kesadaran masyarakat akan syariat islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, banyaknya masjid dan mushalla, sudah berkurangnya anjing berkeliaran.

2. Weakness (Kelemahan)

- a. Masih ada kesenjangan destinasi wisata yang ada di Kota Batu, terutama perbedaan antara wisata desa (objek wisata yang dibangun oleh warga batu sendiri) dengan wisata modern (wisata yang mendapat dana dari para investor).

- b. Masih ada beberapa tempat yang masih belum menerapkan prinsip syariah, seperti tempat hiburan, cafe, spa dan yang lainnya.

3. Opportunitis (Peluang)

- a. Melihat melimpahnya sumber daya yang dimiliki oleh Kota Batu, peluang besar pengembangan produk pariwisata sangatlah besar. Dengan berkembangnya pariwisata di Kota batu, maka akan banyak sector lain yang akan terangkat, terutama sector ekonomi. Selain itu, perkembangan pariwisata akan membuat keadaan sosial masyarakat juga membaik dan akan banyak lapangan pekerjaan yang dibuka.

4. Traets (Ancaman)

- a. Adanya ancaman yang mungkin dihadapi oleh Kota Batu adalah adanya kemacetan lalu lintas, berkurangnya kualitas air dan udara, kemungkinan permasalahan lingkungan di objek wisata.

Tabel 4.6 Tabel kesiapan wisata halal di Kota Batu

No	Kesiapan	Ketidaksiapan
1.	Tersediannya destinasi yang ramah dengan wisatawan muslim dan sebagian besar destinasi wisata yang ada di Kota Batu sudah ramah bagi wisatawan muslim. Sebagai contoh Jatim Park 3 yang didalamnya memiliki masjid sendiri sebagai fasilitas yang disediakan oleh	Belum adanya kesiapan pada pemerintah daerah Kota Batu dalam menghadapi percepatan wisata halal. ditunjukan dengan tidak ada strategi yang dimiliki pemerintah Kota Batu.

	pengelola kepada pengunjung yang ingin melaksanakan ibadah shalat selama berrekreasi.	
2.	Tersediannya penginapan bagi wisatawan muslim yang menyediakan layanan yang menerapkan prinsip syariah. Seperti hotel syariah, guesthouse syariah dan penginapan lain yang menerapkan prinsip syariah.	Masih ada beberapa tempat yang masih belum menerapkan prinsip syariah, seperti tempat hiburan, cafe, spa dan penginapan.
3.	Tersediannya restoran rumah makan atau warung makan yang menyediakan makanan dan minuman halal.	Masih ada restoran atau tempat makan yang menyediakan makanan yang tidak halal.
4.	Kesadaran masyarakat akan syariat islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, banyaknya masjid dan mushalla, sudah berkurangnya anjing berkeliaran.	

Sumber : Data diolah (2020)

4.3 Pembahasan

4.3.1. Visi dan misi

Berdasarkan teori yang dipaparkan pada bab 1, visi adalah suatu gagasan dimana gagasan tersebut menjawab pertanyaan “*what will our business be?*” Atau “*what do we want to become?*” yang artinya “apa yang akan menjadi bisnis kita?” atau “kita ingin menjadi apa?” (Solihin, 2012:21).

Dari teori diatas, pemerintah Kota Batu memiliki visi yang belum membahas sedikit pun tentang wisata halal. Visi itu berbunyi “Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera”. Visi ini masih bersifat umum dan tidak membahas tentang wisata halal.

Selanjutnya misi, menurut teori yang dikutip oleh peneliti, misi adalah suatu tujuan unik atau berbeda yang membedakannya diri dari perusahaan-perusahaan lain sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasional. Jika dalam pernyataan, misi biasanya menjabarkan hal-hal seperti karakteristik atau ciri produk, pasar yang dimasuki serta teknologi yang digunakan (Amrullah, 2015:85).

Misi juga merupakan suatu tujuan mendasar (fundamental purpose) yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lain dalam bidang yang sejenis dan menjelaskan cakupan operasionalnya dalam bentuk produk dan pasar (Pearce & Robinson, 1997:55).

Misi dari Dinas Pariwisata Kota Batu adalah mendukung misi pertama, yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan budaya lokal. Untuk mewujudkan misi tersebut, maka Dinas Pariwisata memiliki program prioritas memajukan kebudayaan lokal daerah.

Selain itu, Dinas Pariwisata juga mendukung misi yang ketiga, yaitu untuk Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata. Untuk mendukung misi tersebut, Dinas Pariwisata memiliki program prioritas pengembangan Desa Wisata berbasis kearifan lokal. Melalui program ini, masyarakat diharapkan agar dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus menjaga potensi dan keunikan lokal daerahnya. Dimana hal tersebut sejalan dengan program prioritas Dinas Pariwisata pada misi pertama.

Demi melakukan percepatan wisata halal di Kota Batu, dibutuhkan visi dan misi Kota Batu yang mendukung akan percepatan wisata halal ini. Namun, faktanya visi dan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu masih belum membahas tentang percepatan wisata halal di Kota Batu.

4.3.2. Lingkungan internal dan eksternal

Berdasarkan teori yang peneliti ambil, lingkungan internal merupakan kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam area fungsional bisnis dan semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan (David, 2006:178).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, lingkungan internal Dinas Pariwisata kota Batu masih belum memiliki kesiapan untuk melakukan percepatan wisata halal. Hal ini didasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Batu yang menyatakan memang belum ada rencana strategi yang teragenda untuk melakukan percepatan wisata halal.

Selain itu, berdasarkan penelusuran dokumen yang dilakukan peneliti juga belum menemukan adanya dokumen yang membahas tentang percepatan wisata halal di Kota Batu. Dokumen yang menjadi acuan peneliti adalah dokumen Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Pariwisata Kota Batu.

Sedangkan menurut Pearce & Robinson (1997:93) lingkungan eksternal adalah segala sesuatu yang berasal dari luar dan tidak berhubungan dengan situasi operasional perusahaan. Lingkungan eksternal dari Dinas Pariwisata Kota Batu terdiri dari masyarakat Kota Batu, tempat ibadah seperti masjid dan musholla, tempat wisatanya, rumah makan dan penginapan.

Masyarakat Kota batu sebenarnya sudah mulai sadar akan kebutuhan religious mereka, dilihat dari meningkatnya masyarakat muslim yang sadar akan ajaran agama islam, ini tercermin dari tidak ada terlihat anjing yang berkeliaran di Kota Batu khususnya di daerah wisata, banyaknya masjid dan musholla yang berdiri, dan banyak kegiatan keagamaan yang ditemukan di daerah Kota Batu.

Selain itu tempat wisata yang peneliti jadikan objek observasi juga sudah banyak yang menyediakan tempat ibadah bagi wisatawan muslim serta menyediakan makanan dan minuman yang halal.

Untuk tempat penginapan yang ada di Kota Batu seperti hotel, villa, home stay dan yang lain juga sudah aday yang menerapkan prinsip syariah, walaupun juga masih banyak yang belum menerapkannya. Namun hal ini memberikan pertanda baik bahwa kesadaran beberapa pemilik usaha penginapan untuk menyediakan penginapan yang memenuhi syariah islam.

Dilihat dari lingkungan eksternal, Kota Batu sebenarnya sudah siap untuk melakukan percepatan wisata halal. Tetapi itu semua tidak akan ada artinya jika tidak ada dukungan penuh dari pemerintah, karena percepatan wisata halal akan berjalan jika didukung dari berbagai pihak, baik masyarakat, pelaku usaha dan juga pemerintah daerah.

4.3.3. Analisis SWOT

Menurut David (2006:8), ia mengatakan bahwa semua organisasi mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam areal fungsional bisnis, tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau lemahnya dalam semua area bisnis. Kekuatan/kelemahan internal, digabungkan dengan peluang/ancaman dari eksternal dan pernyataan misi yang jelas, menjadi dasar untuk penetapan tujuan dan strategi.

Analisa SWOT merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis atau proyek yang mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang mendukung dan yang tidak untuk mencapai tujuan tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, Analisis SWOT yang dimiliki Kota Batu adalah sebagai berikut :

1. Strength (Kekuatan)

- a. Keadaan geografis merupakan keunggulan utama yang dimiliki Kota Batu sebagai nilai jual utama, dengan iklim cuaca yang sejuk dan pemandangan alam yang indah. Kota batu dipenuhi dengan berbagai wisata, baik wisata alam seperti air terjun, pemandian air panas, wisata petuk apel dan wisata buatan seperti Jatim park 1, 2, 3, BNS dan lain sebagainya.
- b. Kesadaran masyarakat akan syariat islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, banyaknya masjid dan mushalla, sudah berkurangnya anjing berkeliaran.

2. Weakness (Kelemahan)

- a. Masih ada kesenjangan destinasi wisata yang ada di Kota Batu, terutama perbedaan antara wisata desa (objek wisata yang dibangun oleh warga batu sendiri) dengan wisata modern (wisata yang mendapat dana dari para investor).
- b. Masih ada beberapa tempat yang masih belum menerapkan prinsip syariah, seperti tempat hiburan, cafe, spa dan yang lainnya.

3. Opportunites (Peluang)

- a. Melihat melimpahnya sumber daya yang dimiliki oleh Kota Batu, peluang besar pengembangan produk pariwisata sangatlah besar. Dengan berkembangnya pariwisata di Kota batu, maka akan banyak sector lain yang akan terangkat, terutama sektor ekonomi. Selain itu, perkembangan pariwisata akan membuat keadaan sosial masyarakat juga membaik dan akan banyak lapangan pekerjaan yang dibuka.

4. Traets (Ancaman)

- a. Adanya ancaman yang mungkin dihadapi oleh Kota Batu adalah adanya kemacetan lalu lintas, berkurangnya kualitas air dan udara, kemungkinan permasalahan lingkungan di objek wisata.

Melihat kekuatan dan peluang pariwisata yang dimiliki oleh Kota Batu, pengembangan pariwisata masih bisa dilakukan lagi. Namun, pengembangan pariwisata itu tidak terlepas dari mempertimbangkan kelemahan dan acaman yang dimiliki Kota Batu.

Didalam analisis SWOT ini memunculkan strategi yang mungkin diterapkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, diantaranya yaitu :

1. Strategi SO (Strengths-Opportunities), Memanfaatkan sumber daya yang ada di Kota Batu untuk membangun pariwisata, terlebih wisata halal atau wisata yang memperhatikan ketentuan syariah islam, maka dengan berkembangnya pariwisata, akan memberikan dampak baik pula bagi kehidupan masyarakat kota Batu.
2. Strategi WO (Weaknesses-Opportunities), Melimpahnya sumber daya yang dimiliki kota Batu, tidak hanya dimanfaatkan oleh investor atau pihak luar saja. Melakukan pembentukan kebijakan dan dukungan untuk mengembangkan desa wisata (wisata yang dikelola oleh warga Batu sendiri) serta memberikan sosialisasi akan pentingnya percepatan wisata halal.
3. Strategi ST (Strengths-Threats), Memanfaatkan kekuatan sumber daya untuk membangun infrastruktur yang baik dalam pengelolaannya, seperti penataan tata kota yang diperbaiki, menertibkan pemukiman warga. Sehingga kota Batu tidak hanya memiliki daya tarik wisata, namun juga menjadi kota yang nyaman untuk singgah
4. Strategi WT (Weaknesses-Threats), Melakukan kerjasama antara investor, masyarakat dan pemerintah kota Batu dalam mengembangkan pariwisata. Strategi ini akan membangun kerjasama yang akan menghasilkan produk atau destinasi wisata yang sangat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Batu lebih tepatnya Dinas Pariwisata Kota Batu sejauh ini sudah membuat rencana strategis(RENSTRA). Rencana strategi tersebut tidak menyebutkan rencana kegiatan yang bertujuan untuk mempercepat wisata halal. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Pengembangan produk Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Batu, bahwa sampai sekarang masih belum ada rencana yang disusun guna melakukan percepatan wisata halal. Kegiatan yang dilakukan selama ini hanya sebatas sosialisasi dengan ruang lingkup yang terbatas, masih belum menyeluruk kepada masyarakat, pelaku usaha wisata dan instansi terkait lainnya.
2. Infrastruktur pendukung di Kota Batu dalam percepatan sebenarnya sudah memadai, seperti sudah banyaknya masjid dan musholla, rumah makan, warung makan atau cafe yang memenuhi kriteria halal. Namun masih ada juga beberapa tempat hiburan dan penyedia jasa spa yang tidak memenuhi kriteria halal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis membuat beberapa saran.

Antara lain :

1. Melihat sumber daya yang melimpah, peneliti menyarankan kepada pemerintah, masyarakat Kota Batu dan para investor untuk saling bekerjasama. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk membangun suatu pariwisata yang dimana bisa mendatangkan manfaat bagi setiap pihak, baik masyarakat Kota Batu maupun para investor yang diawasi oleh pemerintah Kota Batu terutama Dinas Pariwisata.
2. Bagi pemerintah Kota Batu, sedianya melakukan sosialisai akan percepatan wisata halal keberbagai pihak, baik instansi terkait, masyarakat, pelaku usaha wisata dan tempat-tempat hiburan atau penyedia jasa yang belum sesuai syariat islam. Hal ini diperlukan untuk mempermudah percepatan wisata halal di Kota Batu, karena Kota Batu sendiri sudah menyandang kota wisata halal nomor ke-9 di Indonesia yang diberikan oleh IMTI (Indonesia Muslim Travel Index).

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an al-Karim dan terjemahan.
- Amrullah. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Antariksa, W. F. (2017). Penerapan Manajemen Strategi Dalam Dakwah Nabi Muhammad Saw. Diperoleh dari https://www.researchgate.net/publication/319189408_penerapan_manajemen_strategi_dalam_dakwah_nabi_muhammad_saw.
- Assari, E. (2017). *Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi IV)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (8 Januari 2019). *Jumlah Kunjungan Wisatawan Menurut Tempat Wisata dan Wisata Oleh-Oleh di Kota Batu 2017*. Diperoleh dari <https://batukota.bps.go.id/statictable/2019/01/08/366/jumlah-kunjungan-wisatawan-menurut-tempat-wisata-dan-wisata-oleh-oleh-di-kota-batu-2017.html>.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boğan, E., & Sarıışık, M. (2019). Halal tourism: conceptual and practical challenges. *Journal of Islamic Marketing*.
- Bungin, B. (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public Dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Chookaew, S., chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(7), 739–741. <https://doi.org/10.7763/JOEBM.2015.V3.277>
- David, F. R. (2006). *Manajemen Strategis: Konsep (Edisi 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat
- David, F. R. (2010). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Djakfar, M. (2017). *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*. Malang: UIN-MALIKIPRESS.
- Fadhilah, H. (2017). *Kontribusi Radio City Guide 911 Fm Dalam Pengembangan Pariwisata Halal (Halal Tourism) Di Kota Malang Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/2016*.
- Harahsheh, S., Haddad, R., & Alshorman, M. (2019). Implications of marketing Jordan as a Halal tourism destination. *Journal of Islamic Marketing*.
- Muljadi, A. J. (2009). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, H. (2012). *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan Dengan ilustrasi Di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pearce, J. A. II., & Robinson, R. B. (1997). *Manajemen Strategik (Jilid 1)*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Pearce, J. A. II., & Robinson, R. B. (2008). *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rogerson, B. (2012). *Muhammad Biografi Singkat (Cetakan 1)*. Yogyakarta: Mitra Buku.
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan, *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*.
- Setiawan, R. (2019). *10 Destinasi yang Jadikan RI Juara Wisata Halal*. Trevel Detik.com. Diperoleh dari <https://travel.detik.com/travel-news/d-4513215/10-destinasi-yang-jadikan-ri-juara-wisata-halal>.
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran (Vol. 5)*. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. (2002b). *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran (Vol. 8)*. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. (2002c). *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran (Vol. 10)*. Jakarta: Lentera Hati.

- Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama. (2020). *Jumlah masjid dan mushalla Kota Batu*. Diperoleh dari <http://simas.kemenag.go.id/>.
- Solihin, I. (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga.
- Spradley, J. P. (1997). *Metode Etnografi* (Terjemahan oleh Misbah Yulfa Elisabeth). Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Sumarsono, S. (2004). *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Vargas-Sánchez, A., & Moral-Moral, M. (2019). Halal tourism: literature review and experts' view. *Halal tourism*.
- Vargas-Sánchez, A., Moral-Moral, M. (2018). Halal tourism: state of the art. *Tourism Review*.
- WongBatu. (2008). *Sejarah Pemerintahan Kota Batu*. Diperoleh dari <http://www.wongbatu.com/sejarah-pemerintahan-kota-batu/>.

Lampiran 1: Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Batu 2017-2022



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan bimbinganNya semata, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2017-2022 dapat kami selesaikan.

Adapun dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata adalah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Sebagai output dari Renstra Dinas Pariwisata akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan, program-program untuk dilaksanakan secara berkesinambungan disetiap tahunnya, sehingga dapat dilihat hasil kegiatan dalam mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kota Batu serta bersinergi dengan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dalam rencana pembangunan, sebagai upaya untuk memberikan informasi yang terpercaya dan akuntabel untuk mencapai target dan sasaran pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan di Kota Batu.

Dengan berpedoman dengan Renstra ini, seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur.

Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renstra Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2017-2022.

Batu, 31 Mei 2018
Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kota Batu

Drs. IMAM SURYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630928 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	33
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata.....	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	44
BAB VIII PENUTUP	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai organisasi untuk menentukan dan menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi organisasi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai pada masa 5 tahun mendatang; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan dapat tercapai dan menentukan kemana arah pelayanan OPD akan dikembangkan.

Rencana strategis (Renstra) OPD merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi OPD dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan; sifatnya garis besar, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai.

Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi.

Karena penyusunan dokumen rencana strategis OPD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka proses penyusunan rencana strategis OPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan OPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan rencana strategis OPD sesuai tupoksi OPD.

Rencana strategis OPD memiliki fungsi secara spesifik diantaranya;

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan tupoksi OPD dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas OPD dalam implementasinya.

2. Menterjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan OPD agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh OPD.
4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan OPD.
5. Menyediakan dasar untuk mengukur sejauh mana kemajuan dalam mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan.
6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan.
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan.
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja OPD.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; telah mengeluarkan panduan berupa Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang dibangun dalam 6 tahapan yaitu:

1. Tahap Persiapan Penyusunan
 - 1) pembentukan Tim Penyusun Renstra OPD
 - 2) orientasi Renstra OPD
 - 3) penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Rensra
 - 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD
2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal
 - 1) analisis gambaran pelayanan;
 - 2) analisis permasalahan;
 - 3) penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - 4) analisis isu strategis;
 - 5) perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - 6) perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;

- 7) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.
3. Tahap Penyusunan Rancangan
4. Tahapan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
5. Tahapan Perumusan Rancangan Akhir
6. Tahapan Penetapan

Tahapan Pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan untuk mengkomunikasikan rancangan Renstra serta memperoleh penajaman dan penyepakatan. Dalam kegiatan ini melibatkan Stakeholder pariwisata, yaitu Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI Kota Batu), pengelola obyek wisata, pengelola desa wisata, Dewan Kesenian Kota Batu, BAPTA, ASITA, HPI, untuk memberikan masukan-masukan yang berhubungan dengan bidang masing-masing.

Mengingat sangat luasnya ruang lingkup kepariwisataan dalam sebuah daerah khususnya di Kota Batu, sehingga tidak mungkin urusan pembangunan pariwisata menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata sendiri, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, pertanian, ekonomi perdagangan, perijinan usaha, serta perhubungan. Maka dalam penyusunan Renstra ini, Dinas Pariwisata juga berkoordinasi dengan OPD terkait, antara lain Dinas PU Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Koperasi UKM dan Perindag, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan Badan Penanaman Modal Terpadu.

Terkait dengan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Renstra Dinas Pariwisata Kota Batu mensinergikan berbagai substansi dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menjadi isu strategis yang sebagian ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan pembangunan.

Disamping itu juga memperhatikan perundang-undangan kepariwisataan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata beserta Peraturan Menteri Pariwisata terkait dengan Undang-Undang tersebut. Sehingga penyusunan Renstra ini tidak menyimpang dari RPJMD yang telah disusun dan Dinas Pariwisata membuat program yang akan dilaksanakan dengan tata urutan seperti yang ada pada susunan Renstra ini.

Pada RPJPD 2005-2025, dalam mendukung Mengembangkan Struktur Ekonomi Berdaya Saing Global, pengembangan pariwisata diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan berwisata masyarakat, mengembangkan dan melestarikan potensi kesenian dan kebudayaan lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat serta mampu membawa dampak peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah. Sedangkan pengembangan kebudayaan diarahkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis, sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon secara positif dan produktif terhadap modernisasi sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat guna Mewujudkan SDM yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya.

Selanjutnya pada RPJPD Tahap Ketiga (2014–2019) berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama dan kedua, maka pembangunan tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Tahap ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional. Tahapan ini juga ditandai dengan makin dominannya peranan pengetahuan dan penguasaan teknologi serta diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya. Kemajuan yang dicapai menjadikan daerah memiliki daya saing

Terkait dengan RPJMD Kota Batu tahun 2017-2022, Renstra Dinas Pariwisata sepenuhnya berpedoman pada dokumen perencanaan tersebut yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu tahun 2005–2025 serta visi misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2018–2022. Renstra Dinas Pariwisata menindaklanjuti program-program dalam RPJMD dengan menetapkan berbagai kegiatan pembangunan. Semua indikator kinerja dalam RPJMD yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata harus masuk dalam dokumen Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa Renstra Dinas Pariwisata mendukung berbagai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

Terkait dengan Renja Dinas Pariwisata, Renstra Dinas Pariwisata menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Dinas Pariwisata. Program dan kegiatan tahun berkenaan dalam Renstra Dinas Pariwisata diuraikan dalam Renja Dinas Pariwisata.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

- Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025.
 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
 14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010-2030; dan
 15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu 2018 – 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Batu. Penjabaran tersebut diwujudkan dalam suatu dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan pembangunan, sasaran-sasaran strategis, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan misi ke-3 Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 – 2022 yaitu “Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Pada Potensi Unggulan”, dan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab ini menjelaskan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja OPD; landasan hukum yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD; maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD; dan uraian singkat tentang sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dipaparkan rumusan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Batu dari hasil Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi/kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang dan menjelaskan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini berisikan uraian program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan, indikator kinerja, kelompok sasaran yang akan dicapai, dan pendanaan indikatif.

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dasar hukum pembentukan Dinas Pariwisata Kota Batu adalah Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Batu, tertuang pada Peraturan Walikota Batu No. 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Batu.

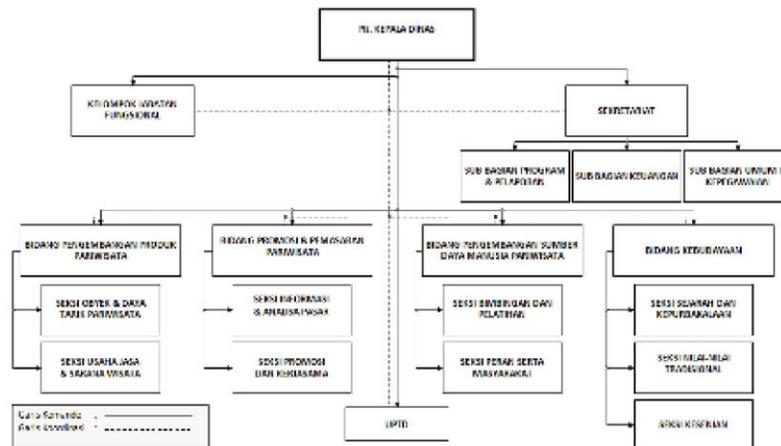
Struktur organisasi Dinas Pariwisata yang ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut tersusun atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, membawahi :
 - a. Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata
 - b. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
4. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 - a. Seksi Informasi dan Analisa Pasar
 - b. Seksi Promosi dan Kerja Sama
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, membawahi :
 - a. Seksi Bimbingan dan Pelatihan
 - b. Seksi Peran Serta Masyarakat
6. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - a. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
 - b. Seksi Nilai-Nilai Tradisional
 - c. Seksi Kesenian
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Hubungan tata kerja antara Kepala Dinas dengan bawahan

atau sebaliknya secara administratif dilakukan melalui Sekretaris.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Batu



Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data pariwisata dan kebudayaan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. pengelolaan kearsipan dinas;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- l. pengelolaan administrasi keuangan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan produk pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Produk Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan program bidang pengembangan produk pariwisata;
- b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan produk pariwisata;
- c. penyusunan standar operasional prosedur bidang pengembangan produk pariwisata;
- d. pengendalian data informasi pengembangan produk pariwisata;
- e. pembinaan potensi usaha kepariwisataan;
- f. pengkajian rekomendasi ijin di bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek, dan daya tarik wisata, serta rekreasi dan hiburan umum;
- g. pembinaan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, dan objek serta daya tarik wisata;
- h. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait di bidang usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum;
- i. pembinaan sarana prasarana pariwisata untuk menunjang daya tarik wisata;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan produk pariwisata;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
- b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
- c. penyusunan standar operasional prosedur bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
- d. pengendalian data informasi bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
- e. perumusan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) skala daerah;
- f. pembinaan pengembangan sistem informasi pariwisata;
- g. pengkajian kerja sama internasional pengembangan destinasi wisata;
- h. pembinaan pameran/event kebudayaan dan pariwisata;
- i. pengendalian pusat pelayanan informasi pariwisata;
- j. perumusan branding (merek) dan tagline (slogan) pariwisata;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang promosi dan pemasaran pariwisata; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- c. penyusunan standar operasional prosedur bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- d. pengendalian data informasi bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- e. pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- f. penyusunan standarisasi kompetensi profesi di bidang pariwisata;

- g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
- h. penyusunan teknis kerja sama dengan instansi terkait di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program bidang kebudayaan;
- b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang kebudayaan;
- c. penyusunan standar operasional prosedur bidang kebudayaan;
- d. pengendalian data informasi bidang kebudayaan;
- e. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan kebudayaan, kepurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah;
- f. penyusunan teknis kerja sama regional, nasional dan internasional di bidang kebudayaan, kepurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah;
- g. pembinaan inventarisasi dan dokumentasi di bidang kebudayaan, kepurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah;
- h. pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
- i. pengendalian perawatan dan pengamanan aset/benda kesenian, Benda Cagar Budaya (BCB), dan situs warisan budaya;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kebudayaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Pariwisata didukung oleh 70 orang personil yang terdiri dari 63 orang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan 7 lainnya adalah Tenaga Honorer Daerah.

Tabel 2.2.1
Data Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pariwisata Kota Batu

Komponen	Keterangan	Jumlah	%
Jumlah Pegawai	L	42	60
	P	28	40
	Jumlah	70	100
Golongan/Ruang	IV/c	1	1
	IV/b	0	0
	IV/a	3	4
	III/d	8	11
	III/c	9	13
	III/b	10	14
	III/a	8	11
	II/d	6	9
	II/c	16	23
	II/b	2	3
	II/a	1	1
	I/c	1	1
	Honorer	7	10
Ijazah Terakhir	S2	8	11
	S1	26	37
	D4	0	0
	D3	11	16
	SMA	19	27
	SD	1	1

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Tahun 2018

Pegawai Dinas Pariwisata Kondisi SDM aparatur Dinas Pariwisata menurut tingkat pendidikan sudah cukup memadai, kondisi ini ditunjukkan dengan sebagian besar aparatur Dinas Pariwisata berpendidikan tinggi.

2.2.2 Prasarana / Sarana

Sumber daya aset yang dimiliki Dinas Pariwisata Kota Batu disajikan dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2.2
Data Sarana dan Prasarana

No	Spesifikasi Barang	Satuan	Jumlah Barang
1	Tanah	Bidang	1
2	Peralatan & Mesin	Unit	735

No	Spesifikasi Barang	Satuan	Jumlah Barang
3	Gedung & Bangunan	Unit	25
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	Unit	4
5	Aset Tetap Lainnya	Unit	302
6	Kendaraan Roda 4	Unit	2
7	Kendaraan Roda 2	Unit	12
8	Alat Kantor	Buah	-

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata 2018

Kondisi aspek sarana dan prasarana tersebut digambarkan sebagai berikut :

1. Gedung Utama (Kantor), berada di Block Office Batu Among Tani Gedung B Lantai II. Terdiri dari 1 ruang Kepala Dinas, 1 ruang Sekretaris, 4 ruang Kepala Bidang, dan 1 ruang Gudang. Untuk ruang utama dipisahkan oleh sekat dan terbagi menjadi area lobi, area sekretariat, area kepala seksi, staf, dan area tenaga pengelola data dan desain.
2. Gedung Kesenian Mbatu Aji, berada di Jl. Raya Oro-Oro Ombo No.9, Kec. Batu. Terdiri dari 2 gedung utama, 1 amphiteater, 5 kios untuk memasarkan karya seni, lapangan parkir, 2 bangunan dibelakang amphiteater untuk ruang ganti, 2 kamar mandi di bawah tribun amphiteater. Gedung sebelah utara terdiri dari 1 ruang untuk kantor Dewan Kesenian dan hall kesenian. Sedangkan gedung sebelah selatan terdiri dari hall kesenian dan ruang untuk penjaga gedung.
3. Area Landing Paralayang, berada di Kelurahan Songgokerto yang terdiri dari beberapa area :
 - a. Gedung area landing paralayang. Dengan luas bangunan 126 m², gedung yang dibangun sejak 2016 ini terdiri dari 1 ruang pengurus dan lapangan sebagai area landing Paralayang.
 - b. Jembatan ponton. Jembatan yang berfungsi sebagai penghubung jalan ke area landing paralayang ini dibangun pada 2010
 - c. Area Parkir. Dibangun pada tahun 2010
4. Area takeoff Paralayang, berada di Gunung Banyak. Terdiri dari mushola, toilet dan fasilitas pendukung lain.
5. Kampung Wisata Kungkuk, berada di Desa Punten Kecamatan Bumiaji terdiri dari :
 - a. Gapura Desa Wisata. Dibangun pada tahun 2010
 - b. Gazebo. Dibangun pada tahun 2011
 - c. Gudang, kamar mandi, dan area outbound. Dibangun pada tahun 2012

- d. Halaman parkir dan papan nama desa wisata. Pada tahun 2017 telah dilakukan pavingisasi pada halaman parkir dengan luas 352 m².
- 6. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang ada dalam kondisi baik dan memadai.
- 7. Meja, kursi, almari kantor dan ruangan yang ada kondisinya masih baik dan representatif.
- 8. Perangkat komputer dan komponen pendukung yang ada masih jauh dari cukup. Dengan jumlah pegawai sebanyak 70 orang, hanya tersedia 28 unit komputer dan laptop. 82 % diantaranya telah berusia lebih dari 8 tahun. Untuk printer hanya tersedia 12 unit dan 75% diantaranya telah berusia lebih dari 8 tahun. Sehingga perlu peremajaan komputer dan printer untuk meningkatkan kapasitas kinerja Dinas Pariwisata.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kota Batu, sesuai tugas fungsinya melaksanakan urusan pilihan pariwisata dan urusan wajib non pelayanan dasar kebudayaan.

Kewenangan Kota Batu dibidang pariwisata meliputi Promosi dan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Produk Pariwisata, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, melalui Program Pembinaan Pengembangan Produk dan Destinasi Pariwisata, Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

Sedangkan kewenangan di bidang kebudayaan meliputi Sejarah dan Kepurbakalaan, Nilai-Nilai Tradisional, dan Kesenian melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Budaya.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Batu

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan																			
1	Cakupan Kajian Seni (%)	v			53	53	53	53	53	33	33	33	40	20	0,62	0,62	0,62	0,75	0,38
2	Cakupan Fasilitas Seni (%)	v			43	43	43	43	43	43	43	43	57	43	1,00	1,00	1,00	1,33	1,00
3	Cakupan gelar seni (%)	v			75	75	75	75	75	75	100	100	75	100	1,00	1,33	1,33	1,00	1,33
4	Misi kesenian (%)	v			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	1,00	1,00	1,00	0,00
5	Cakupan sumber daya manusia kesenian	v			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Cakupan tempat kesenian	v			100	100	100	100	100	50	50	50	50	50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
7	Cakupan organisasi kesenian	v			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	v			0	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
9	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	v			2	3	2	2	2	42	1	1	1	1	21,00	0,33	0,50	0,50	0,50
Urusan Pilihan Pariwisata																			
1	Jumlah kunjungan wisata (juta orang)	v			2,70	2,86	3,03	3,22	3,41	3,29	3,36	3,72	3,97	4,79	1,22	1,18	1,22	1,23	1,40

Batu, 31 Mei 2018
Pjt. Kepala Dinas Pariwisata
Kota Batu

Drs. IMAM SURYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630928 199503 1 001

Renstra Dinas Pariwisata Kota Batu 2018-2022

17

Tabel T-C.23.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Batu

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PESTUJURAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar an	Realisa si
URUSAN PILIHAN PARIWISATA	7.137.497.500	10.623.462.500	11.416.613.500	6.276.122.000	9.348.453.600	6.777.846.304	8.460.228.912	8.538.229.547	5.445.811.500	4.508.288.382	36	81	75	87	76	0,18	0,63
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	390.000.000	870.743.500	947.365.500	648.160.000	626.255.000	757.774.939	711.886.372	736.788.411	575.848.550	600.645.420	97	84	78	89	86	(0,04)	(0,02)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	390.000.000	275.500.000	250.000.000	147.000.000	364.500.000	373.764.531	247.944.915	234.133.720	145.026.900	356.201.250	96	90	94	99	98	0,17	0,17
Program Peningkatan Kualifikasi Aparatur	24.850.000	-	42.748.000	-	20.000.000	23.075.000	-	36.535.000	-	19.800.000	93	-	85	-	99	(0,50)	(0,50)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.000.000	-	24.200.000	14.200.000	25.732.000	68.493.250	-	12.292.000	2.160.000	19.180.000	98	-	51	15	75	(0,13)	1,51
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29.811.500	-	5.000.000	-	14.250.000	17.453.000	-	5.000.000	-	-	59	-	100	-	-	(0,50)	(0,50)
Program Pengembangan Promosi Pariwisata	4.753.630.000	6.091.620.000	6.742.300.000	3.647.762.000	6.288.616.000	4.579.501.220	5.716.711.300	5.859.140.899	2.947.336.800	3.966.847.717	96	94	87	81	63	0,16	0,63
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	566.400.000	2.282.500.000	2.250.000.000	243.000.000	1.153.100.000	448.342.454	1.195.372.375	692.629.500	222.850.000	883.866.915	79	52	31	92	77	1,47	0,88
Program Pengembangan Kemiraan	542.200.000	1.103.100.000	1.070.000.000	1.575.000.000	756.000.000	508.636.000	908.310.950	961.550.000	1.552.409.250	662.564.080	94	82	90	99	88	0,24	0,22
Program Manajemen Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,25)	-
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN	1.542.582.500	2.529.137.500	2.244.200.000	2.149.023.815	1.307.462.000	1.455.620.500	2.382.328.500	2.528.405.500	2.011.927.000	1.923.268.000	94	94	90	95	92	0,27	0,13
Program Pengembangan Nilai Budaya	65.650.000	130.650.000	746.000.000	300.000.000	200.000.000	65.400.000	128.800.000	681.072.500	92.390.000	169.050.000	100	99	91	92	85	1,46	1,31
Program Pengelolaan Kerjasama Budaya	521.642.500	815.487.500	243.000.000	415.000.000	948.810.000	446.565.500	739.737.500	147.030.000	402.501.000	168.470.000	86	91	61	97	18	0,46	0,25
Program Pengelolaan Kerjasama Budaya	855.210.000	1.483.000.000	1.724.200.000	1.484.053.815	2.218.852.000	843.755.000	1.414.291.000	1.612.551.000	1.399.701.048	1.435.748.000	99	95	94	94	65	0,31	0,18
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kerjasama Budaya	100.000.000	100.000.000	121.000.000	150.000.000	-	99.950.000	100.000.000	118.152.000	117.335.000	150.000.000	100	100	98	92	-	(0,14)	0,11
Total	8.700.000.000	13.152.600.000	14.250.813.500	8.425.175.815	12.616.115.600	8.231.710.804	11.183.997.412	11.097.065.047	8.432.376.382	8.432.376.382	95	85	78	89	67	0,17	0,04

Renstra Dinas Pariwisata Kota Batu 2018-2022

18

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Propinsi

Dalam Renstra Kementerian Pariwisata periode 2015-2019 yang ditetapkan melalui Permenpar No 29 Tahun 2015, ditetapkan target jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 sebesar 280 juta wisatawan, yang terdiri dari 265 juta wisatawan nusantara dan 15 juta wisatawan mancanegara. Dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 2,79% (Periode 2015-2017).

Sementara itu, dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur periode 2014-2019, ditetapkan target jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 sebesar 48,9 juta wisatawan. Dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 6% (Periode 2013-2017).

Di Kota Batu, realisasi jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 sebesar 4,79 juta orang wisatawan, dengan realisasi rata-rata pertumbuhan kunjungan wisatawan sebesar 10% tiap tahunnya (periode 2013-2017). Jika dibandingkan dengan target jumlah kunjungan wisatawan pada Renstra Kementerian Pariwisata dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata propinsi Jawa Timur, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan Kota Batu sebagai Kota Wisata sangat pesat.

Tabel 2.5.

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kota Batu terhadap Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur dan Renstra Kementerian Pariwisata

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kota Batu	Sasaran pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian Pariwisata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah kunjungan wisata (juta)	4,79	48,96	280,00

2.4.2. Hasil telaah terhadap RTRW

Fokus pembangunan Kota Batu pada tahun 2017-2022 sesuai dengan kajian Rencana Tata Ruang Wilayah periode 2010-2030 diarahkan pada perwujudan kawasan pariwisata melalui pengembangan kawasan wisata modern; Pengembangan wisata Desa, Agrowisata, wisata adventure;

Pengembangan even-even wisata; dan Pengembangan obyek wisata unggulan di Kota Batu yang terintegrasi secara spasial dengan memperhatikan keunggulan dan daya saing secara global melalui:

- a. Pengidentifikasian potensi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia;
- b. Penetapan potensi daya tarik wisata unggulan;
- c. Pembentukan jalur pengembangan wisata yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur wilayah;
- d. Pengembangan kegiatan penunjang wisata;
- e. Pelestarian tradisi atau kearifan masyarakat lokal; dan
- f. Peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada masyarakat dan/atau perajin lokal untuk pengembangan pariwisata.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

- a. Pelengkapan sarana dan prasarana pariwisata sesuai dengan kebutuhan, rencana pengembangan, dan tingkat pelayanan setiap kawasan daya tarik wisata;
- b. Penguatan sinergitas daya tarik wisata unggulan dalam bentuk koridor pariwisata;
- c. Pengembangan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
- d. Pengembangan pemasaran pariwisata melalui pengembangan pasar wisatawan, citra destinasi wisata, kemitraan pemasaran pariwisata, dan perwakilan promosi pariwisata.

Strategi pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran kawasan sosial dan budaya dilakukan dengan memelihara nilai sejarah dan budaya yang tinggi serta nilai-nilai yang asli dengan pengelolaan yang mengapresiasi nilai tersebut melalui:

- a. Pelestarian kawasan sosial dan budaya;
- b. Pengendalian perkembangan lahan terbangun di sekitar kawasan;
- c. Peningkatan nilai ekonomis kawasan, antara lain pemanfaatan sebagai aset wisata, penelitian, dan pendidikan; dan
- d. Pembinaan masyarakat sekitar untuk ikut berperan dalam menjaga peninggalan sejarah

Indikasi Program Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu di sektor pariwisata :

- A. Perwujudan Struktur Ruang
 - a. Perwujudan pusat kegiatan
 - i. Gedung kesenian dan teater di Desa Oro-oro Ombo

- b. Perwujudan Sistem Prasarana
 - i. Pengembangan jalur wisata
 - 1. Jalur mountain bike di Desa Bulukerto-Bumiaji
 - 2. Jalur Cross road/offroad, jalur outbound, dan jalur pendakian gunung di Desa Bumiaji, Songgokerto, Tulungrejo, Pesanggrahan
- B. Perwujudan Pola Ruang
 - a. Perwujudan kawasan lindung
 - i. Konservasi cagar budaya
 - 1. Konservasi bangunan bersejarah di kota dan tempat wisata di pusat kota, Songgoriti, dan Seleka
 - ii. Pengembangan Kawasan Taman Wisata Alam
 - 1. Perancangan ulang Arboretum di Desa Sumberbrantas
 - b. Perwujudan kawasan budidaya
 - i. Pengembangan kawasan hutan produksi
 - 1. pengembangan agroforestry dan ecotourism di Desa Oro-oro Ombo, Desa Tlekung, Desa Pesanggrahan dan Desa Songgokerto
 - ii. Pengembangan wisata alam, wisata minat khusus dan wisata budaya
 - 1. Pengembangan lokasi obyek wisata kota di desa Oro-oro Ombo
 - 2. Peningkatan prasarana wisata berupa penginapan dan akomodasi
 - 3. Wisata living with people di Bumiaji
 - 4. Wisata adventure di Bumiaji dan Gunung Banyak
 - 5. Pengembangan botanical garden, Great nature of batu, Ecotourism, Agrotourism, memorial resort, sportuorism di Tulungrejo dan Sumber Brantas
 - 6. Kegiatan wisata paralayang di Gunung Banyak
- C. Perwujudan Kawasan Strategis
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
 - i. Pengembang kawasan strategis unggulan pariwisata
 - 1. Pengembangan garden stay dengan tema kegiatan wisata living with flowers farmers
 - 2. Pengembangan Wisata adventure dan alam : paralayang dan sirkuit off roads di Gunung Banyak; Kegiatan Camping Ground di obyek wisata Pemandian air Panas Cangar; Rencana kereta gantung dan resort serta cottages
 - 3. Program promosi wisata

4. Pengembangan wisata belanja melalui pembangunan pusat belanja dan kawasan wisata kuliner dan pasar wisata
5. Program pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan wisata: tempat parkir wisata, rest area, pengembangan akomodasi wisata (pasar wisata dan pasar seni yang terdapat di Desa Oro-oro Ombo dan Songgokerto)

Dalam upaya pengembangan tersebut yang berkaitan dengan kebijakannya, Dinas Pariwisata Kota Batu berada pada :

- Kebijakan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi wilayah melalui sektor pariwisata, dengan upaya perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal; dan pengembangan kegiatan ekonomi yang berpotensi untuk menghasilkan nilai tambah dari produk lokal.
- Kebijakan pemerataan pembangunan wilayah melalui pengembangan desa wisata untuk mendorong kawasan yang belum berkembang potensi ekonominya maupun kondisi kesejahteraan masyarakatnya.

2.4.3. Hasil telaah terhadap KLHS

Tema dan isu-isu pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD Kota Batu 2017-2022 memiliki fokus pada keberdayaan desa, sehingga terwujudnya Kota Batu sebagai sentra agro wisata internasional yang memiliki karakter, daya saing dan sejahtera.

Berkaitan dengan tema pariwisata berkelanjutan, maka dihasilkan isu strategis : masih belum efektifnya kolaborasi para pelaku wisata berbasis potensi dan budaya lokal di desa-desa Kota Batu. Untuk menghadapi isu tersebut, maka dirumuskan program prioritas yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata adalah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan rekomendasi mutu rancangan/materi program/regulasi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan investor, calon investor, dan daerah sekitar terutama dengan investor asing
- b. Identifikasi kajian area potensial pariwisata baru terutama pariwisata berbasis alam
- c. Perencanaan manajemen pengelolaan destinasi wisata alam
- d. Penyusunan regulasi mengenai alih fungsi lahan sekaligus pengendalian dan pengawasan destinasi pariwisata

- e. Melakukan kerjasama antar dinas yang terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan dan berupaya mencegah terjadinya masalah
- f. Pelaksanaan pelatihan, peningkatan pendidikan dan keahlian bagi masyarakat
- g. Mengembangkan potensi local wisdom yang dipadukan dengan pola green development untuk pariwisata baru

Tabel 2.8.
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kota Batu

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1	2	3	4	5
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Kemampuan ekosistem untuk mendukung suatu aktivitas/kegiatan sehingga dapat ditentukan kegiatan yang masih bisa ditambahkan dalam suatu ekosistem tertentu atau dengan kata lain untuk memastikan suatu kawasan lingkungan masih mampu mendukung kehidupan manusia ataupun makhluk hidup lain	Rencana pengembangan kegiatan sektor perdagangan dan jasa Rencana pengembangan sektor perkantoran Rencana pengembangan sektor perumahan Rencana pengembangan fasilitas pelayanan umum Rencana pengembangan sektor pariwisata Rencana pengembangan sektor industri Rencana kawasan strategis pertumbuhan ekonomi	Rencana pengembangan kegiatan harus tetap memperhatikan kawasan yang digunakan untuk daerah resapan air, kawasan lindung (tidak adanya alih fungsi lahan) dan tidak menimbulkan pencemaran air didalam pelaksanaannya.
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Prediksi dari dampak suatu kebijakan, rencana atau program terhadap terjadinya perubahan lingkungan hidup yang mendasar.	Rencana pengembangan kegiatan sektor perdagangan dan jasa Rencana pengembangan sektor perkantoran Rencana pengembangan sektor perumahan Rencana pengembangan fasilitas pelayanan umum Rencana pengembangan sektor pariwisata Rencana pengembangan sektor industri Rencana kawasan strategis pertumbuhan ekonomi	Untuk rencana pengembangan kegiatan harus menganalisis tingkat kekerentanan/kemiringan suatu lahan (tanah) karena tingkat kemiringan yang tinggi akan kurang ekonomis dimana untuk melakukan <i>cut and fill</i> memerlukan biaya yang cukup besar dan risiko erosi yang tinggi Rencana pengembangan harus mengacu pada prosedur yang berlaku sehingga tidak terjadi adanya penurunan kualitas lingkungan yaitu polusi tanah, air dan udara akibat limbah kegiatan.
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Kemampuan untuk mencapai suatu hasil melalui fungsi ekosistem/layanan meliputi layanan fungsional, layanan regulasi, layanan pendukung kehidupan.	Rencana pola ruang kawasan budidaya	Rencana pengembangan perlu didukung oleh regulasi yang jelas dan tegas sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan produktif pertanian yang dapat mengancam ketahanan pangan. Dengan adanya regulasi yang tepat maka dapat meminimalisir kawasan terbangun sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada pengendalian banjir maupun erosi.
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Pendayagunaan sampai tingkat optimal dalam pemanfaatan sumberdaya alam di mana kebutuhan terpenuhi namun sumber daya alam dapat tetap dilestarikan.	Rencana pengembangan sektor pariwisata	Untuk pengembangan kawasan wisata yang mengarah pada pembukaan lahan baru guna membangun obyek wisata baru perlu dikaji secara mendalam terkait dengan sumber daya alam (daerah resapan air, polusi tanah, udara dan daya dukung lingkungan lainnya) sehingga obyek wisata yang telah ada dapat dimaksimalkan sarana, prasarana serta pelayannya.
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Kondisi lingkungan yang tidak dapat diduga dari kemungkinan dampak perubahan iklim	Rencana pengembangan sektor perumahan	Pembangunan perumahan, real estate maupun hotel harus ada regulasi yang jelas dan pasti karena membuka lahan baru dengan cara menebang hutan dapat berakibat pada perubahan iklim global dan perubahan iklim yang ekstrim yang berdampak pada musim kering berkepanjangan, musim hujan yang semakin tinggi, hujan angin ataupun badai.

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1	2	3	4	5
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Kondisi lingkungan yang cenderung tetap dan dapat diukur dengan indeks keanekaragaman hayati	Rencana pengembangan kegiatan sektor perdagangan dan jasa Rencana pengembangan sektor perkantoran Rencana pengembangan sektor perumahan Rencana pengembangan fasilitas pelayanan umum Rencana pengembangan sektor pariwisata Rencana pengembangan sektor industri Rencana kawasan strategis Rencana pola ruang kawasan budidaya	Pengelolaan rencana pengembangan kegiatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak berakibat berkurangnya hutan lindung yang berdampak pada penurunan keanekaragaman hayati.

Sumber : Hasil Analisis terhadap KLHS Kota Batu

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD

Penyusunan renstra Dinas Pariwisata Kota Batu didasarkan pada berbagai macam isu strategis/permasalahan yang berkembang baik dari lingkungan internal maupun eksternal Dinas Pariwisata Kota Batu, yang tentunya berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata. Isu strategis ini sangat perlu untuk mendapat perhatian karena akan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Apabila isu strategis tidak diantisipasi, akan dapat menimbulkan kerugian atau hambatan bagi kinerja Dinas Pariwisata, dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan Dinas Pariwisata. Namun sebaliknya apabila isu strategis diantisipasi, maka Dinas Pariwisata dapat menekan faktor penghambat dan memanfaatkan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pariwisata.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Pariwisata, analisis renstra Dinas Pariwisata, analisis renstra Bappeprov Jawa Timur, hasil analisis RTRW Kota Batu, dan hasil analisis KLHS Kota Batu. Identifikasi disajikan dalam tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Batu

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata
			Internal (Kewenangan Dinas Pariwisata)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Pariwisata)	
1	2	3	4	5	6
Gambaran pelayanan Dinas Pariwisata meliputi : Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang pariwisata dan kebudayaan. penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan; pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan; penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang pariwisata dan kebudayaan; pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan kebudayaan; penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya	Tersedianya dokumen Renstra Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2012-2017. Tersedianya dokumen Perencanaan Tahunan Terlaksananya peninjauan aspirasi masyarakat melalui forum dalam proses penyusunan perencanaan pengembangan kepariwisataan daerah. Terselenggaranya peningkatan kualitas aparatur melalui bimtek dan pelatihan Tersedianya dokumen laporan tahunan	Standar Pelayanan Minimal (SPM). Indikator kinerja kunci. Indikator kinerja yang ditetapkan sendiri.	Tingkat kemampuan sumber daya aparatur Dinas Pariwisata dalam mengerjakan pekerjaannya sesuai tugas dan fungsinya. Koordinasi antar bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemampuan managerial unsur pimpinan Dinas Pariwisata dalam mendelegasikan tugas pekerjaan agar dapat terselesaikan dengan baik. Ketaatan dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diterima. Tindakan evaluasi terhadap hasil pekerjaan. Keberadaan data dan informasi yang valid dan terkini. Dukungan kinerja kesekretariatan Dinas Pariwisata.	Dukungan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah terkait pelaksanaan tugas koordinasi dengan SKPD lain. Dukungan DPRD dalam pembahasan dan penetapan dokumen perencanaan. Dukungan sumber daya penganggaran. Dukungan SKPD lain dalam menunjang kelancaran koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan. Dukungan seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan perencanaan daerah.	Kurangnya dukungan kemampuan/keahlian sumber daya aparatur Dinas Pariwisata dalam menyelesaikan tugas pekerjaan. Kurangnya etos kerja yang baik dari mayoritas sumber daya aparatur Dinas Pariwisata. Adanya konflik pribadi dalam Dinas Pariwisata yang cenderung menghambat kinerja pelayanan Dinas Pariwisata. Kurang valid dan terkini data dan informasi yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata. Kurangnya evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Pariwisata. Tidak lancarnya koordinasi antar SKPD. Tidak lancarnya pembahasan-pembahasan dengan DPRD.
Kajian terhadap Renstra Kementerian Pariwisata	Perencanaan pembangunan pariwisata Kota Batu yang sedang dalam upaya untuk benar-benar dapat bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga arah pembangunan pariwisata Kota Batu dapat mendukung capaian	RPJMN tahun 2010-2014. RKP nasional tahun berkenaan. Renstra Kementerian Pariwisata 2015-2019.	Analisis secara mendalam terhadap berbagai substansi perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional. Penetapan berbagai substansi dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah yang dapat menjabarkan visi dan misi	Evaluasi dari Biro Organisasi Jawa Timur terhadap SAKIP Dinas . Penyebaran rancangan awal perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional maupun dokumen perencanaan nasional yang telah ditetapkan, baik melalui media online atau media lain yang efektif.	Kesulitan penetapan indikator kinerja yang baik, yang mungkin disebabkan adanya indikator tingkat nasional yang tidak dapat diterapkan di daerah.

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata
			Internal (Kewenangan Dinas Pariwisata)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Pariwisata)	
1	2	3	4	5	6
	pembangunan secara nasional. Terlaksananya pelibatan seluruh stakeholder Kota Batu dalam rangka penyusunan rencana pembangunan kepariwisataan daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas data dan informasi capaian kinerja dengan cara meningkatkan kualitas evaluasi capaian kinerja.		pembangunan kepariwisataan daerah, dan sekaligus mengkomodifikasi substansi perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional. Kualitas penyelenggaraan kegiatan peninjauan aspirasi masyarakat, dan peninjauan aspirasi masyarakat berdasarkan prioritas yang ditetapkan. Penetapan berbagai indikator kinerja yang harus dilaksanakan dan diukur oleh setiap pejabat di Dinas Pariwisata	Dukungan dan komitmen dari kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, dan seluruh SKPD dalam penetapan dan pelaksanaan indikator kinerja dalam rangka mewujudkan data dan informasi capaian kinerja yang valid dan terkini.	
Kajian terhadap Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur.	Perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah Kota Batu dalam upaya sinkronisasi terhadap perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Timur. Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Batu yang sangat perlu untuk diberdayakan dalam tugas penyusunan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah. Kota Batu belum mengembangkan sistem informasi terkait data dan informasi pariwisata	Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Peraturan perundangan tentang pedoman pengembangan kepariwisataan daerah.	Analisis mendalam terhadap berbagai substansi dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan Kota Batu Melaksanakan pendampingan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan melibatkan pihak ketiga yang berkualitas. Mengembangkan sistem informasi data dan informasi capaian kinerja tingkat kota.	Evaluasi dari Biro Organisasi Jawa Timur terhadap SAKIP Dinas . Penyebaran rancangan awal perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional maupun dokumen perencanaan nasional yang telah ditetapkan, baik melalui media online atau media lain yang efektif. Penyebaran dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah lain di sekitar Kota Batu melalui media online atau media lain yang efektif.	Belum atau tidak ada dampak nyata peningkatan kemampuan sumber daya aparatur perencanaan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencanaan.
Kajian terhadap RTRW.	Telah terbangunnya beberapa sarana prasarana sesuai dengan struktur ruang yang telah ditetapkan.	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu	Penetapan dokumen perencanaan tata ruang wilayah yang lebih mendetail antara lain RDRK dan BWK.	Komitmen seluruh stakeholder Kota Batu untuk dapat mematuhi RTRW Kota Batu yang telah diperdakan. Koordinasi antar SKPD terkait dalam	Benturan kepentingan dengan pihak ketiga yang terkena dampak dari implementasi RTRW.

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata
			Internal (Kewenangan Dinas Pariwisata)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Pariwisata)	
1	2	3	4	5	6
	Telah terbangunnya beberapa sarana prasarana sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan.		Mengeluarkan izin pemanfaatan ruang bagi pihak yang berkepentingan. Penindakan secara tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan tata ruang.	mengimplementasikan dan mengendalikan pemanfaatan tata ruang.	Kesulitan dalam mempertahankan rencana tata ruang terkait dengan kawasan tertentu yang berstatus kepemilikan pribadi. Kesulitan dalam menghadapi campur tangan pihak ketiga dalam pembahasan dan penetapan perencanaan tata ruang.
Kajian KLHS meliputi : Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Kinerja layanan/jasa ekosistem. Efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Dimilikinya Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030.	Peraturan perundangan yang mengatur tentang pedoman penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	Pemanfaatan hasil kajian dalam mendasari penyusunan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah	Kualitas dan komitmen pihak ketiga yang melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk membuat kajian yang berkualitas. Komitmen dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu untuk berpegang pada hasil kajian dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang terkait dengan aspek kajian.	Belum sesuainya Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan peraturan perundangan tentang KLHS. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen KLHS. Terkesampingkannya pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kurangnya kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis baik dalam proses maupun hasil kajiannya.

Sumber : Hasil Analisis Permasalahan Pelayanan SKPD.

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas dan kuantitas wisata yang harus ditingkatkan	Rendahnya kualitas dan kuantitas daya tarik dan usaha jasa pariwisata Rendahnya daya saing SDM Pariwisata Kurang optimalnya kunjungan wisatawan	Rendahnya kesadaran pelaku usaha jasa pariwisata dalam standarisasi Minimnya pemanfaatan potensi lokal dalam pengembangan daya tarik wisata Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM Pariwisata; Rendahnya kesadaran SDM Pariwisata dalam sertifikasi kompetensinya Promosi dan kerjasama pariwisata yang belum optimal; Belum tersedianya informasi potensi pariwisata yang akurat dan akuntabel
2	Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan harus ditingkatkan	Pelestarian nilai budaya yang masih kurang optimal	Belum tersedianya Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan Daerah Belum tersedianya sistem informasi kebudayaan daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

“ **Desa Berdaya Kota Berjaya** Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra **Agro Wisata Internasional** Yang **Berkarakter, Berdaya Saing** Dan **Sejahtera** ”

Visi Kota Batu Tahun 2018-2022

Untuk menelaah visi Kepala Daerah tersebut terkait dengan pembangunan sektor pariwisata, maka dijabarkan dalam 5 bagian utama, yaitu :

1. **Desa Berdaya Kota Berjaya** : dititikberatkan pada kemandirian dan kemajuan desa
2. **AgroWisata Internasional** : AgroWisata yang dimaksud bukanlah pariwisata berbasis pertanian, melainkan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Dan kata internasional mengacu pada standarisasi kualitas produk pariwisata
3. **Berkarakter** : pembangunan di Kota Batu khususnya sektor pariwisata harus memperhatikan lingkungan dan mempertahankan ciri khas budaya yang ada
4. **Berdaya saing** : pengembangan pariwisata harus didukung dengan SDM Pariwisata yang berkualitas
5. **Sejahtera** : peningkatan kesejahteraan masyarakat baik jasmani maupun rohani



Untuk mewujudkan visi kepala daerah tersebut, maka dijabarkan dalam misi Kota Batu :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal.
2. Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan Yang Berkualitas dan Berkawasan Lingkungan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional

Dinas Pariwisata mendukung misi pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal. Untuk mewujudkan misi tersebut, maka Dinas Pariwisata memiliki program prioritas memajukan kebudayaan lokal daerah. Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan Kebudayaan lokal daerah sebagai bagian dari pelestarian Kebudayaan dalam menjaga identitas unik daerah.

Selain itu, Dinas Pariwisata juga mendukung misi ketiga, yaitu untuk Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata. Untuk mendukung misi tersebut, maka Dinas Pariwisata memiliki program prioritas pengembangan Desa Wisata berbasis kearifan lokal. Melalui program ini, masyarakat diharapkan agar dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus menjaga potensi dan keunikan lokal daerahnya. Dimana hal tersebut sejalan dengan program prioritas Dinas Pariwisata pada misi pertama.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Isu perubahan iklim menjadi isu seluruh dunia, yang disebabkan dari kelalaian manusia, seperti perubahan alih fungsi lahan, penebangan pohon, eksploitasi air tanah yang berlebihan, hingga pencemaran lingkungan. Suhu udara yang semakin meningkat tiap tahunnya akibat dari efek rumah kaca menjadi menjadi faktor penghambat dalam menjaga pengembangan Kota Batu sebagai Kota Wisata yang berhawa sejuk.

Agar kepariwisataan dapat berkelanjutan (Sustainable Tourism) maka untuk mengatasi faktor penghambat tersebut dibutuhkan langkah-langkah seperti penyadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, pemberian sanksi kepada usaha yang merusak lingkungan, hingga menyusun strategi tanggap bencana lingkungan di berbagai obyek wisata.

3.3.2. Ketersediaan infrastruktur yang belum optimal

Perkembangan Kota Batu sebagai Kota Wisata sangat pesat, bahkan sering muncul titik-titik kemacetan setiap libur panjang tiba. Hal tersebut dapat mengurangi kenyamanan wisatawan dalam menikmati pesona Kota Batu. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk merekayasa lalu lintas maupun pembangunan jalur alternatif agar wisatawan semakin nyaman mengunjungi Kota Batu.

3.3.3. Kesiapan Masyarakat di Sekitar Destinasi Pariwisata yang Masih Belum Optimal

Banyak daerah yang sudah dikenal wisatawan namun tidak diimbangi oleh kesiapan masyarakat sekitar. Hal ini akan berakibat pada kurang terawatnya destinasi wisata, kurang profesionalnya pengelolaan destinasi wisata, serta eksploitasi berlebihan dari destinasi wisata. Untuk mencegah timbulnya masalah tersebut, diperlukan pemberdayaan masyarakat di daerah destinasi wisata. Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan dengan menanamkan nilai dan tujuan pariwisata Indonesia dan memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengembangkan sendiri daerahnya dengan bertanggung jawab sebagai daerah destinasi wisata.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Pembangunan pariwisata yang kurang sinergi dengan dokumen RTRW dan KLHS

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang ada di suatu wilayah Kabupaten/Kota, terutama di Kota Batu dimana wilayah yang dapat dikembangkan sangat terbatas. Pengembangan industri pariwisata yang tidak sesuai dengan dokumen RTRW akan menjadi faktor penghambat dan berpotensi untuk menimbulkan konflik antara pelaku usaha pariwisata, masyarakat, dan pemerintah.

Untuk mencegah timbulnya masalah tersebut, maka diperlukan penegakan peraturan daerah terkait RTRW. Diantaranya dengan menyusun rencana pengembangan pariwisata yang mengacu pada RTRW, sosialisasi pada pelaku usaha dan masyarakat, hingga pemberian sanksi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang menyalahi peraturan terkait RTRW tersebut.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan telaah visi misi Kepala Daerah, telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi, serta telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka Dinas Pariwisata merumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata belum maksimal dan belum terintegrasi
2. Pengembangan Industri Pariwisata belum maksimal
3. Pengembangan Destinasi Pariwisata belum optimal
4. Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata yang belum maksimal
5. Pelestarian Kebudayaan yang belum maksimal dan belum terintegrasi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah		Persentase Seni Budaya Lokal Yang Lestari (%)	85	85	85	85	85
1.1		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah	Jumlah kelompok seni budaya yang aktif (kelompok)	100	110	120	130	140
2	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang inklusif berkelanjutan pada sektor pariwisata		Jumlah PDRB Pariwisata (juta rupiah)	2.970.533	3.178.470	3.400.963	3.639.030	3.893.762
2.1		Meningkatnya kualitas dan daya tarik wisata berbasis kearifan lokal	Rerata pengeluaran belanja Wisatawan (Rp)	564.740	576.035	587.556	599.307	611.293
2.2			Jumlah Kunjungan Wisatawan (juta orang)	5,26	5,79	6,37	7,01	7,71
2.3			Persentase Desa Wisata berkategori maju berbasis potensi unggulan (%)	4,17	12,50	25,00	37,50	50,00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera		
MISI I	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	1. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah	1. Penyusunan Pokok Pikiran Pengembangan Kebudayaan Daerah 2. Event Kebudayaan 3. Pemberdayaan pelaku seni budaya	1.1. Pelestarian Kebudayaan
MISI III	Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan aktivitas perekonomian yang inklusif berkelanjutan pada sektor pariwisata	1. Meningkatnya kualitas dan daya Tarik wisata berbasis kearifan lokal	1. Pengembangan Desa Wisata 2. Event Pariwisata	1.1. Pengembangan Produk dan Destinasi Pariwisata 1.2. Pengembangan SDM Pariwisata 2.1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kegiatan di Dinas Pariwisata periode 2017-2022 difokuskan pada peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui Desa Wisata. Peran Dinas Pariwisata adalah sebagai pembina. Diantaranya melalui peningkatan kapasitas SDM masyarakat dengan mengadakan bimtek dan pelatihan bagi masyarakat dan pelaku usaha, pembentukan komunitas masyarakat sadar wisata, pembentukan komunitas masyarakat ekonomi kreatif, dan kampanye sapta pesona.

Selain itu Dinas Pariwisata memfasilitasi pembentukan Desa Wisata dengan membangun sarana prasarana pendukung, memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dengan memanfaatkan dana CSR, menyusun pedoman desa wisata agar pembangunan Desa Wisata sinergi dengan pemanfaatan wilayah Kota dan tidak mengesampingkan pelestarian lingkungan.

Dinas Pariwisata juga berperan dengan mencari pangsa pasar yang potensial untuk memasarkan produk desa wisata, disamping juga dengan mendatangkan kunjungan ke Desa Wisata melalui event-event kebudayaan dan pariwisata.

Melalui bidang kebudayaan, Dinas Pariwisata berperan dalam memajukan kebudayaan lokal daerah yang sejalan dengan fokus pengembangan Desa Wisata berbasis kearifan lokal. Dengan memanfaatkan nilai tradisi yang ada dan diangkat menjadi event Kota, dan dipadu dengan kreatifitas kelompok kesenian menjadikan keunikan tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Kota Batu. Situs, dan benda purbakala yang ada, memiliki potensi untuk dapat dikembangkan menjadi Daya Tarik Wisata baru yang sekaligus dapat menambah ketertarikan wisatawan untuk mengenal Kota Batu.

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pariwisata
Kota Batu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya pelaksanaan dan pengembangan budaya daerah				Persentase Seni Budaya Lokal Yang Lestari (%)	85	85	-	85	-	85	-	85	-	85	-	85,00	-	Dinas Pariwisata	
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah			Jumlah kelompok seni budaya yang aktif (kelompok)	N/A	100	-	110	-	120	-	130	-	140	-	140,00	-	Dinas Pariwisata	
		2.13	Program Pembinaan dan Pengembangan Budaya	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	57,14	57,14	3.048.003.960	57,14	4.340.000.000	57,14	4.855.000.000	57,14	5.980.000.000	57,14	6.180.000.000	57,14	24.403.003.960	Bidang Kebudayaan	
				Persentase seni budaya yang terakumulasi (%)	0	100		100		100		100		100		100			
		2.13.01	Kegiatan Pelestarian Nilai-nilai tradisional Daerah	Jumlah fasilitas event nilai-nilai tradisional daerah (event)	0	3	310.450.000	3	310.000.000	4	500.000.000	4	600.000.000	5	700.000.000	19	2.420.450.000	Seksi Nilai-nilai Tradisional	Kota Batu
				Jumlah peserta benek nilai tradisi (orang)	0	0	-	0	-	75	150.000.000	75	150.000.000	75	150.000.000	225	450.000.000		
				Jumlah nilai tradisional yang terdokumentasikan (nilai tradisional)	0	0	-	0	-	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	18	300.000.000		
		2.13.02	Kegiatan Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan Daerah	Jumlah peserta benek pelestarian sejarah dan kepurbakalaan (orang)	0	0	-	50	100.000.000	80	175.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	290	875.000.000	Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan	Kota Batu
				Jumlah situs, benda, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan (unit)	0	0	-	0	-	0	-	5	500.000.000	5	500.000.000	10	1.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah situs, benda, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (unit)	0	11	168.793.000	20	200.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	61	668.793.000		
				Jumlah situs, benda, dan kawasan cagar budaya yang didokumentasikan (unit)	0	0	-	0	-	0	-	5	500.000.000	5	500.000.000	10	1.000.000.000		
				Jumlah sejarah lokal daerah yang telah ditetapkan (dokumen)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	2	100.000.000	2	100.000.000		
		2.13.03	Kegiatan Pelestarian Kesenian Daerah	Jumlah event kesenian daerah yang diikuti dan dilaksanakan (event)	0	22	2.538.760.960	22	3.700.000.000	22	3.700.000.000	22	3.700.000.000	22	3.700.000.000	110	17.338.760.960	Seksi Kesenian	Kota Batu
				Jumlah aset/benda kesenian yang dibelikan (unit)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	150.000.000		
				Jumlah kelompok seni yang mendapat pembinaan (kelompok seni)	0	0	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-		
				Jumlah peserta benek pelestari seni (orang)	0	0	-	0	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	6	300.000.000		
Meningkatnya aktivitas perekonomian yang inklusif berkelanjutan pada sektor pariwisata				Jumlah PDRB Pariwisata (Juta Rupiah)	2.776.199	2.970.533	-	3.178.470	-	3.400.963	-	3.639.030	-	3.893.762	-	3.893.762	-	Dinas Pariwisata	
	Meningkatnya kualitas dan daya tarik wisata berbasis kearifan lokal			Rerata pengeluaran Belanja Wisatawan (Rp)	N/A	564.740	-	576.035	-	587.556	-	599.307	-	611.293	-	611.293	-	Dinas Pariwisata	
				Jumlah Wisatawan (juta orang)	4,79	5,26	-	5,79	-	6,37	-	7,01	-	7,71	-	7,71	-	Dinas Pariwisata	
				Persentase Desa Wisata berkategori maju berbasis potensi unggulan (%)	0	4,17	-	12,30	-	23,00	-	37,50	-	50,00	-	50	-	Dinas Pariwisata	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Pembinaan Pengembangan Produk dan Destinasi Pariwisata	Persentase daya wisata dengan sarana prasarana yang memadai (%)	0	4,17	585.000.000	12,50	2.110.000.000	25,00	2.245.000.000	37,50	2.820.000.000	50,00	2.410.000.000	50	10.170.000.000	Bidang Pengembangan Produk Pariwisata	
		3.10.01	Kegiatan Pengembangan Objek & Daya Tarik Pariwisata	Jumlah sarana prasarana penunjang daya tarik wisata yang terpelihara (unit)	0	0	580.000.000	2	2.030.000.000	32	2.200.000.000	56	2.720.000.000	48	2.360.000.000	138.000	9.890.000.000	Seksi Obyek & Daya Tarik Pariwisata	Desa Wisata
				Jumlah sarana prasarana penunjang daya tarik wisata yang terpelihara (unit)	0	1	5.000.000	6	80.000.000	7	45.000.000	2	100.000.000	3	50.000.000	19.000	280.000.000		Luar Kota Batu
		3.10.02	Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa & Sarana Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi persyaratan dasar standarisasi (usaha pariwisata)	12	3	160.000.000	3	60.000.000	3	160.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	27	500.000.000	Seksi Usaha Jasa & Sarana Pariwisata	Kota Batu
				Jumlah pelaku usaha pariwisata yang telah mendapat pembinaan (pelaku usaha)	0	100	225.000.000	400	450.000.000	200	300.000.000	300	375.000.000	300	375.000.000	1300	1.725.000.000		Kota Batu
		3.11	Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Cakupan wilayah pemasaran wisatawan	1	2	2.123.925.000	3	3.291.000.000	3	3.666.000.000	3	4.191.000.000	3	4.716.000.000	15	17.987.925.000	Bidang Promosi & Pemasaran Pariwisata	
		3.11.01	Kegiatan Pengembangan Analisis Pasar Pariwisata	Jumlah dokumen analisa data pemasaran pariwisata (dokumen)	N/A	0	-	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	12	1.200.000.000	Seksi Informasi & Analisa Pasar	Dinas Pariwisata
				Jumlah lembaga yang terhubung dalam Sistem Informasi Pariwisata (lembaga)	N/A	5	116.000.000	20	266.000.000	20	116.000.000	20	116.000.000	20	116.000.000	80	730.000.000		Dinas Pariwisata
		3.11.02	Kegiatan pengembangan promosi dan kerjasama bidang	Jumlah hasil kerjanya pengembangan pemasaran pariwisata (MoU)	N/A	0	-	1	35.000.000	3	50.000.000	3	75.000.000	4	100.000.000	11	250.000.000	Seksi Promosi & Kerjasama	Kota Batu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			pariwisata	Jumlah event wisata yang diikuti dan dilaksanakan (event)	3	6	1.807.925.000	7	2.500.000.000	8	3.000.000.000	9	3.500.000.000	11	4.000.000.000	44	14.807.925.000		Dalam dan luar Kota Batu
				Jumlah media promosi pariwisata (media)	3	6	200.000.000	7	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	34	1.000.000.000		Kota Batu
		3.12	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	411	60	200.575.000	60	220.000.000	60	240.000.000	60	260.000.000	60	280.000.000	711	1.200.575.000	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	
				Jumlah lembaga pariwisata yang mendapat pembinaan (lembaga)	24	1	1.450.823.000	1	880.000.000	1	1.845.000.000	1	1.025.000.000	1	2.110.000.000	29	7.310.823.000		
		3.12.01	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	Jumlah peserta pembinaan teknis kompetensi profesi SDM pariwisata (orang)	40	60	200.375.000	60	220.000.000	60	240.000.000	60	260.000.000	60	280.000.000	340	1.200.375.000	Seksi Bimbingan dan Pelatihan	Kota Batu
		3.12.02	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Pariwisata	Jumlah kelompok masyarakat pariwisata yang mendapat pembinaan (kelompok)	0	1	1.450.823.000	2	880.000.000	2	1.845.000.000	2	1.025.000.000	2	2.110.000.000	9	7.310.823.000	Seksi Peran Serta Masyarakat	Kota Batu
Meningkatnya kualitas pelayanan dinas				Indeks Kepuasan Masyarakat	8	8		8		8		8		8				Dinas Pariwisata	
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan layanan kepada masyarakat (%)	100	100		100		100		100		100				Dinas Pariwisata	
		3.01	Program Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja kepada aparatur internal dinas (%)	100	100	907.093.240	100	997.800.000	100	1.043.100.000	100	1.088.600.000	100	1.133.800.000	100	5.170.393.240	Sekretariat	Dinas Pariwisata
		3.01.01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbentuk (dokumen)	0	7	15.000.000	6	-	6	-	6	-	6	-	31	15.000.000	Sis Bagan Program dan Pelaporan	Dinas Pariwisata
				Jumlah dokumen monitoring dan	0	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	20	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kendali Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Perangkat Daerah	evaluasi yang berbentuk (dokumen)															
		3.01.02	Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen CAK yang berbentuk (dokumen)	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	Sub Bagian Keuangan	Dinas Pariwisata
		3.01.03	Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan rutin dinas (bulan)	12	12	934.593.240	12	997.800.000	12	1.073.350.000	12	1.088.600.000	12	1.167.075.000	12	5.261.418.240	Subbagian Umum & Kepegawaian	Dinas Pariwisata
		3.01.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah fasilitas peningkatan kapabilitas pegawai dinas (orang/hari)	257	405	40.500.000	405	44.600.000	405	46.600.000	405	48.600.000	405	50.600.000	2282	230.900.000	Subbagian Umum & Kepegawaian	Dinas Pariwisata
		3.01.05	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Perangkat Daerah	Jumlah perkantoran gedung kantor yang disediakan (unit)	10	7	61.711.000	8	65.800.000	8	71.000.000	8	74.100.000	8	77.100.000	49	349.711.000	Subbagian Umum & Kepegawaian	Dinas Pariwisata
				Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	2	1	56.800.000	1	62.500.000	1	65.300.000	1	68.200.000	1	71.000.000	7	323.800.000		
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	0	14	114.464.000	14	125.900.000	14	131.600.000	14	137.400.000	14	143.100.000	70	652.464.000		
				Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (unit)	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	57.500.000	1	60.000.000	1	62.500.000	6	285.000.000		
				JUMLAH			9.066.395.200		12.702.600.000		14.756.350.000		16.187.900.000		17.762.375.000		72.089.407.480		

Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kota Batu

Drs. IMAM SURYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630928 199503 1 001

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun Indikator					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Seni Budaya Lokal Yang Lestari (%)	85	85	85	85	85	85	85
2	Jumlah PDRB Pariwisata (juta rupiah)	2.776.199	2.970.533	3.178.470	3.400.963	3.639.030	3.893.762	3.893.762

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) satuan kerja perangkat daerah sesuai format yang di sosialisasikan Bappelitbangda Kota Batu sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategik Satuan Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu 2017-2022 disusun hanya sampai dengan Perancangan Program. Sedangkan implementasi masing-masing program berupa kegiatan akan disusun setiap tahun dalam format Rencana Kinerja Tahunan (RKT/Renja) Dinas Parwisata Kota Batu.

Dengan tersusunnya Rencana Strategik ini, maka masing-masing bidang dan bagian Tata Usaha unit kerja Dinas Pariwisata Kota Batu telah memiliki pedoman dan arah bagi pengembangan maupun pembangunan pariwisata Kota Batu dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2017-2022.

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

1. Transkrip wawancara dengan narasumber Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Batu.

Nama : Hasanatul Mardiyah Hs,SH.,MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Dinas
Pariwisata Kota Batu

Hati/Tanggal : Selasa, 31 Desember 2019

Pukul : 11:09 WIB

Tempat : Dinas Pariwisata Kota Batu

No	Pertanyaan dan Hasil Wawancara
1	Peneliti : Sudah sejauh mana progres yang dilakukan pemerintah Kota Batu terutama Dinas Pariwisata dalam mengembangkan wisata halal di Kota Batu?
	Ibu Mardiyah : Sejauh ini pemerintah Kota Batu baru akan mengembangkan dalah halal percepatan wisata halal. Untuk kota yang sudah melakupan percepatan wisata halal itu contohnya Kota Malang, mereka sudah banyak melakukan program.
2	Peneliti : Apakah benar-benar memang belum ada tindakan sama sekali yang dilakukan Dinas Pariwisata?
	Ibu Mardiyah : Sebenarnya memang secara tidak langsung sudah ada tindakan yang dilakukan Dinas Pariwisata yang sifatnya bukan program yang teragendakan.
3	Peneliti : Langkah apa yang menjadi keinginan dari Dinas Pariwisata Kota Batu dalam menangani masalah percepatan wisata halal ini?
	Ibu Mardiyah : Jadi untuk pertama, karena pemerintah Kota Batu membranding kota Batu sebagai kota wisata, bersamaan dengan program kementerian Pariwisata dalam percepatan wisata halal,

	pemerintah kota Batu juga ingin mewujudkan wisata halal, hal ini juga akan berdampak pada kunjungan wisatawan nantinya, terutama dari wisatawan mancanegara.
4	Peneliti : Untuk mewujudkannya, program apa saja yang mungkin akan dilaksanakan untuk kedepannya?
	Ibu Mardiyah : Keinginan dan impian Dinas Pariwisata Kota Batu yang pertama adalah semua destinasi wisata yang ada di kota Batu bisa melaksanakan program wisata halal ini, baik para pelaku usaha wisata maupun para pihak pendukung yang lain. Kedua , di daerah destinasi tidak ada anjing berkeliaran disekitarnya. Ketiga , di tempat makan atau cafe-cafe memiliki makanan dan minuman yang sudah bersertifikasi halal, jika memang tidak halal, harus ada pelabelan atau keterangan jika makanan atau minuman yang dijual tidak halal. Keempat , semua penginapan seperti hotel, villa, guest house, rumah singgah dan yang lainnya juga memberikan pelayanan yang syariah atau halal, seperti adanya kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Kelima , para penyedia biro perjalanan atau penyedia jasa perjalanan wisata juga memberikan layanan yang sesuai dengan kaidah syariah, misal jika dalam perjalan ada terdengar adzan, maka para biro perjalanan ini memberikan kesempatan pada wisatawan untuk melaksanakan ibadah shalat.
5	Peneliti : Langkah apa yang sudah diambil oleh Dinas Pariwisata untuk mempercepat wisata halal ini?
	Ibu Mardiyah : Pertama , sosialisasi kepada beberapa perwakilan pelaku wisata lainnya terkait program wisata halal. Kedua , sosialisasi dan kerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Kementerian Keagamaan Kota Batu, MUI dan lainnya terkait program wisata halal. Sebetulnya kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Batu selama ini sudah mendukung dalam program percepatan wisata halal, namun memang belum ada program yang benar-benar dilaksanakan untuk menangani percepatan wisata halal, selama ini sifatnya dengan menyisipkan sedikit sosialisasi pada kegiatan yang sudah ada.
6	Peneliti : Jika memang belum ada program yang dibentuk atau disepakati, langkah awal apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Batu terutama Dinas Pariwisata kota batu untuk mempercepat wisata halal di kota Batu?

	<p>Ibu Mardiyah : untuk kedepannya, Dinas Pariwisata akan bekerja sama dengan dinas terkait dalam menyusun program untuk wisata halal dengan membuat forum komunikasi. Selanjutnya meminta persetujuan walikota untuk melaksanakannya. Hal ini dilakukan karena program ini tidak bisa berjalan tanpa ada bantuan dan keterlibatan pihak lain. Hal ini ingin segera kami lakukan karena memang kota Batu sudah menerima MOU atau kesepakatan untuk melakukan percepatan wisata halal dengan Kementerian Pariwisata bersama Malang Raya. Malang Raya juga dinobatkan sebagai kota wisata halal nomer 9 oleh IMTI (Indonesia Muslim Travel Index).</p>
7	<p>Peneliti : Kota mana yang menjadi tolak ukur atau contoh sebagai kota yang sudah melakukan percepatan kota wisata halal oleh kota Batu?</p>
	<p>Ibu Mardiyah : Kemarin Dinas Pariwisata kota Batu sudah melakukan beberapa kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata di kota lain, salah satunya yaitu Sumatera Barat, mereka sudah baik dalam melakukan percepatan wisata halal ini.</p>

Lampiran 3 Foto observasi







skripsi

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.m.wikipedia.org Internet Source	2%
2	pt.scribd.com Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
4	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1%
5	ekanetaputri.blogspot.com Internet Source	1%
6	henrich27.blogspot.com Internet Source	1%
7	albanjarirohman.blogspot.com Internet Source	1%
8	Aan Jaelani, Edy Setyawan, Nursyamsudin .. "RELIGI, BUDAYA DAN EKONOMI KREATIF: Prospek dan Pengembangan Pariwisata Halal di Cirebon", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian	1%

Hukum Ekonomi Syariah, 2017

Publication

9	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
10	arroyanagusmiyanto.blogspot.com Internet Source	1 %
11	www.materibahasa.web.id Internet Source	1 %
12	banjarmasin.bpk.go.id Internet Source	1 %
13	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1 %
14	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
16	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	<1 %
17	tr.scribd.com Internet Source	<1 %
18	digilib.sunan-ampel.ac.id Internet Source	<1 %
19	issuu.com	

	Internet Source	<1 %
20	ejurnal.esaunggul.ac.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
22	mfstudent.wordpress.com Internet Source	<1 %
23	"Exploring the Islamic and halal tourism definition", Hospitality and Tourism 2015, 2015. Publication	<1 %
24	rahmattullohislam.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	fe.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
26	proceedings.undip.ac.id Internet Source	<1 %
27	torisetsu.cc Internet Source	<1 %
28	Subaidi, Ikmalul Ihsan. "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Maslahah, Cabang Pembantu Olean Situbondo", Istitdal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2019 Publication	<1 %

29	www.keceleg.com Internet Source	<1 %
30	Submitted to University College Birmingham Student Paper	<1 %
31	mediaumatislam.com Internet Source	<1 %
32	islam-respon.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	fuadio26.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	jurnal.stikeskusumahusada.ac.id Internet Source	<1 %
35	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
36	ajijumiono.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	wisatahalal.sv.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
38	etd.uum.edu.my Internet Source	<1 %
39	Fitri Amalia. "PENGARUH TINGKAT PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH, JUB DAN PDB TERHADAP SBI SYARIAH PERIODE	<1 %

2003-2013 DENGAN PENDEKATAN ECM", INFERENSI, 2014

Publication

40	Submitted to Bournemouth University Student Paper	<1 %
41	bappeda.papua.go.id Internet Source	<1 %
42	ojs.uniska-bjm.ac.id Internet Source	<1 %
43	Novita Wahyu S.. "ANALISIS LINGKUNGAN TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING PADA IKM DI BANDUNG, JAWA BARAT", Majalah Ilmiah Bijak, 2018 Publication	<1 %
44	siraj-pendidikanuntuksemua.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	www.kopertis7.go.id Internet Source	<1 %
46	princessharamain.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	<1 %
48	Andika Andika, Mulia Jaya. "Media sosial sebagai model tradisi bertandang baru di era	<1 %

digital", Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah,
2019

Publication

49	malpertanian.blogspot.com Internet Source	<1 %
50	allwi1504.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	wartabanten.com Internet Source	<1 %
52	repository.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
53	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
54	rehabhatimalang.wordpress.com Internet Source	<1 %
55	bapenda.samarindakota.go.id Internet Source	<1 %
56	Ardiyansah. "Strategi Peningkatan Predikat Daerah Tertinggal di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten", JDKP : Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 2020 Publication	<1 %
57	Xiong Jia, Zhang Chaozhi. "'Halal tourism': is it the same trend in non-Islamic destinations with Islamic destinations?", Asia Pacific Journal of	<1 %

Tourism Research, 2019

Publication

-
- | | | |
|-----------|--|----------------|
| 58 | <p>D Santoso, S Albaniah. "Development of an Electrical Engineering Module for the Expertise Program of Industrial Electronics Engineering", <i>Journal of Physics: Conference Series</i>, 2020</p> <p>Publication</p> | <1 % |
| <hr/> | | |
| 59 | <p>publication.petra.ac.id</p> <p>Internet Source</p> | <1 % |
| <hr/> | | |
| 60 | <p>Girish Prayag. "Halal tourism: looking into the future through the past", <i>Tourism Recreation Research</i>, 2020</p> <p>Publication</p> | <1 % |
| <hr/> | | |
| 61 | <p>Heesup Han, Amr Al-Ansi, Mehmet Ali Koseoglu, Pearl M. C. Lin, Jinah Park, Jongsik Yu, Wansoo Kim. "Halal tourism: travel motivators and customer retention", <i>Journal of Travel & Tourism Marketing</i>, 2019</p> <p>Publication</p> | <1 % |
| <hr/> | | |
| 62 | <p>Rasoava Rijamampianina, Russell Abratt, Yumiko February. "A framework for concentric diversification through sustainable competitive advantage", <i>Management Decision</i>, 2003</p> <p>Publication</p> | <1 % |
| <hr/> | | |
| 63 | <p>www.hukumonline.com</p> <p>Internet Source</p> | <1 % |
-

64	liayuliasitirohmah.blogspot.com Internet Source	<1 %
65	Yosiko Hizkia Panambunan, Agnes E. Loho, Eyverson ., Ruauw. "STRATEGI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI BERBAHAN BAKU BUAH SEGAR (STUDI KASUS SOP BUAH ICA DI MANADO)", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2016 Publication	<1 %
66	www.pekalongantimes.com Internet Source	<1 %
67	Susilawati Susilawati, Syaripah Syaripah. "Analisis Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Berbasis Tematik di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Rejang Lebong", AR-RIAYAH : Jurnal Pendidikan Dasar, 2019 Publication	<1 %
68	telematikapedesaan.wordpress.com Internet Source	<1 %
69	ppid.batukota.go.id Internet Source	<1 %
70	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
71	giapjournals.com Internet Source	<1 %

72	gudangmakalah.blogspot.com Internet Source	<1 %
73	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	<1 %
74	Syamsul Rijal. "PROBLEMATIKA EPISTEMOLOGIS TENTANG VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM", AHSANA MEDIA, 2019 Publication	<1 %
75	anismumtaaz.blogspot.com Internet Source	<1 %
76	eprints.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
77	aimos.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
78	caramenghilangkankeriput.com Internet Source	<1 %
79	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
80	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
81	repository.wima.ac.id Internet Source	<1 %

82	mynewblogtugasku19.blogspot.com Internet Source	<1 %
83	www.ohrana.volgocity.ru Internet Source	<1 %
84	ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	<1 %
85	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
86	konsultanekonomi.blogspot.com Internet Source	<1 %
87	dgip.go.id Internet Source	<1 %
88	www.termpaperwarehouse.com Internet Source	<1 %
89	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %
90	Satria Adhitama, Dwi Rahma Ramadani Aulia. "ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DENGAN MODEL FOUR LEVERS OF CONTROL DI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI", INFO ARTHA, 2017 Publication	<1 %
91	periyonolano.blogspot.com Internet Source	<1 %

92	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
93	dibilikkamar.blogspot.com Internet Source	<1 %
94	nadinanovaria.blogspot.com Internet Source	<1 %
95	aslibogor.blogspot.com Internet Source	<1 %
96	www.poliupg.ac.id Internet Source	<1 %
97	suaragaruda.com Internet Source	<1 %
98	www.indonesiapower.co.id Internet Source	<1 %
99	wisatajogjaaro.com Internet Source	<1 %
100	pekalongankab.go.id Internet Source	<1 %
101	griyasampah.blogspot.com Internet Source	<1 %
102	kediri.muhammadiyah.or.id Internet Source	<1 %

M. Arif Hakim. "AT-TA'MIN AT-TA'AWUNI:

103	ALTERNATIF ASURANSI DALAM ISLAM", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2011 Publication	<1 %
104	Submitted to Universitas Pancasila Student Paper	<1 %
105	pn-lubuksikaping.go.id Internet Source	<1 %
106	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	<1 %
107	civildoqument.blogspot.com Internet Source	<1 %
108	dokumen.tips Internet Source	<1 %
109	Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper	<1 %
110	ejournal2.pnp.ac.id Internet Source	<1 %
111	jimbarancafe.net Internet Source	<1 %
112	www.sewavilla.info Internet Source	<1 %
	gtg.webhost.uoradea.ro	

113	Internet Source	<1%
114	Riza Khoirur Roda`i, Novi Triana Habsari. "Kesenian Gembrungan Di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun (Kajian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Pembelajaran Sejarah Lokal)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2016 Publication	<1%
115	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off